Smart Governance

Smart Education

Smart Healthcare

"Menuju Kabupaten Cerdas Tahun 2021"

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN - 2017

Pemerintah Kabupaten Sleman
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868405 - Faksimile (0274) 868945 - Laman: slemankab.go.id

Batik Sinom Parijotho Salak
Motif Batik Khas Sleman

KATA PENGANTAR

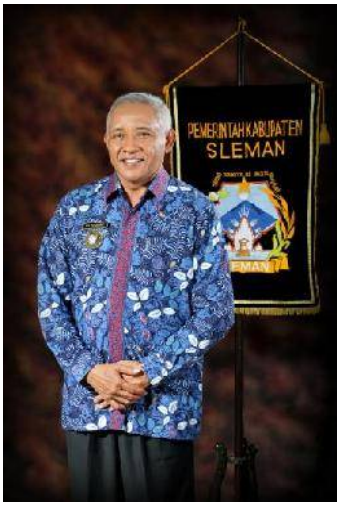

Assalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Kabupaten Sleman kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumberdaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2017. Tujuan penyusunan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKjIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur, Sumberdaya Keuangan, dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKjIP, dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2017. Semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* pada Tahun 2021 dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Sleman, Maret 2018

Bupati Sleman

SRI PURNOMO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 diwarnai beberapa perubahan. Pada aspek perencanaan kinerja, dokumen RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Perubahan ini telah disesuaikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 termasuk perubahannya, yang terdiri 15 sasaran, 35 indikator kinerja, 178 program, dan 929 kegiatan (kegiatan yang sama dihitung 1 kali) atau 2.130 kegiatan (kegiatan yang sama dihitung sesuai dengan jumlah pelaksanaannya).

Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 sasaran, semuanya mencapai kinerja lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) dengan kategori “sangat berhasil”. Hasil pengukuran masing-masing sasaran telah dianalisis, meliputi capaian kinerjanya, cara menghitung, perbandingan realisasi dengan tahun lalu, dibandingkan dengan data capaian kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia, program yang mendukung sasaran, realisasi anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran atau indikator kinerja, dan prestasi Pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2017. Prestasi Pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2017 berjumlah 39 prestasi.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan anggaran diperoleh informasi sebagai berikut: pembandingan tingkat capaian sasaran dengan penyerapan anggaran, dari 15 sasaran menunjukkan 13 sasaran diantaranya mencapai efisien atau mencapai 86,66%, serta efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* sebesar 11,35%.

Rekomendasi dari Inspektorat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditindaklanjuti, dan telah direncanakan pula tindak lanjutnya untuk tahun 2018.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1
	C. Perangkat Daerah	3
	D. Sumberdaya Aparatur	8
	E. Sumberdaya Keuangan	10
	F. Isu Strategis	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	A. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	17
	B. Misi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	17
	C. Tujuan Pembangunan Daerah	17
	D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	21
	E. Indikator Kinerja Utama	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	A. Pengukuran Kinerja	25
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	25
	1. Analisis Kinerja Sasaran 1	22
	2. Analisis Kinerja Sasaran 2	29
	3. Analisis Kinerja Sasaran 3	30
	4. Analisis Kinerja Sasaran 4	38
	5. Analisis Kinerja Sasaran 5	41
	6. Analisis Kinerja Sasaran 6	46
	7. Analisis Kinerja Sasaran 7	48
	8. Analisis Kinerja Sasaran 8	61
	9. Analisis Kinerja Sasaran 9	64
	10. Analisis Kinerja Sasaran 10	67
	11. Analisis Kinerja Sasaran 11	70
	12. Analisis Kinerja Sasaran 12	73
	13. Analisis Kinerja Sasaran 13	79
	14. Analisis Kinerja Sasaran 14	81
	15. Analisis Kinerja Sasaran 15	83
	C. Analisis Efisien Penggunaan Anggaran	86
BAB IV	PENUTUP	88
	1. Kesimpulan	88
	2. Tindal Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta	88

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016, kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; (2) rencana pembangunan tahun 2017 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; dan (3) Perjanjian Kinerja Bupati Sleman tahun 2017.

Selanjutnya buku ini akan menyajikan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunanya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

1) pendidikan;
2) kesehatan;
3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6) sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

1) tenaga kerja;
2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3) pangan;
4) pertanahan;
5) lingkungan hidup;
6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) perhubungan;
10) komunikasi dan informatika;
11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
12) penanaman modal;
13) kepemudaan dan olahraga;
14) statistik;
15) persandian;
16) perpustakaan; dan
17) kearsipan.

c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

Di samping itu juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah DIY.

C. Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat daerah Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, berikut sejumlah Peraturan Bupati Sleman yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah maupun unit pelaksana teknis daerah.

Komposisi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017 dengan jumlah perangkat daerah sebanyak 48 perangkat daerah, yaitu:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;

d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
h. Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja;
k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
m. Dinas Pertanian, Pangan, dan Kehutanan;
n. Dinas Lingkungan Hidup;
o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
q. Dinas Perhubungan;
r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
u. Dinas Kebudayaan;
v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
w. Dinas Pariwisata;
x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

cc. Kecamatan, yang terdiri dari;

1) Kecamatan Gamping
2) Kecamatan Godean
3) Kecamatan Moyudan
4) Kecamatan Minggir
5) Kecamatan Seyegan
6) Kecamatan Mlati
7) Kecamatan Depok
8) Kecamatan Berbah
9) Kecamatan Prambanan
10) Kecamatan Kalasan
11) Kecamatan Ngemplak
12) Kecamatan Ngaglik
13) Kecamatan Sleman
14) Kecamatan Tempel
15) Kecamatan Turi
16) Kecamatan Pakem
17) Kecamatan Cangkringan

dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman; dan
ff. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017 sebanyak 79 UPT, yaitu:

1) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Gamping
2) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean
3) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan
4) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Minggir
5) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Seyegan
6) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati

7) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok
8) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah
9) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Prambanan
10) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan
11) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak
12) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngaglik
13) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman
14) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel
15) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Turi
16) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Pakem
17) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan
18) Laboratorium Kesehatan
19) UPT Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan
20) UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
21) Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
22) Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II
23) Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I
24) Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II
25) Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan

26) Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir
27) Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan
28) Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I
29) Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II
30) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I

31) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II
32) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III
33) Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah
34) Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan
35) Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan
36) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak I
37) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II
38) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik I
39) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II
40) Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman
41) Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel I
42) Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel II
43) Pusat Kesehatan Masyarakat Turi
44) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem
45) Pusat Kesehatan Masyarakat Cangkringan
46) Rumah Susun Sederhana Sewa
47) Taman Pemakaman Umum
48) UPT Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal
49) UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat
50) UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur
51) UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah
52) Balai Latihan Kerja
53) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
54) Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan
55) UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
56) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan
57) Sub Terminal Agribisnis
58) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah I
59) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah II
60) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III
61) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV
62) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V
63) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI
64) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VII
65) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VIII
66) UPT Pelayanan Persampahan
67) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
68) UPT Pengelolaan Parkir
69) UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik

70) UPT Museum Gunungapi Merapi
71) UPT Pelayanan Metrologi Legal
72) UPT Pelayanan Pasar Kelompok I
73) UPT Pelayanan Pasar Kelompok II
74) UPT Pelayanan Pasar Kelompok III
75) UPT Pelayanan Pasar Kelompok IV
76) UPT Pelayanan Pasar Kelompok V
77) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
78) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo
79) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 sebanyak 837 jabatan struktural, yang terdiri dari:

1. eselon IIa: 1
2. eselon IIb: 35
3. eselon IIIa: 61
4. eselon IIIb: 117
5. eselon IVa pada Perangkat Daerah: 431
6. eselon IVa pada UPT: 79
7. eselon IVb pada Perangkat Daerah: 34
8. eselon IVb pada UPT: 79

D. Sumberdaya Aparatur

Sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2017 sebanyak 9.428 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	59	9	68	0.72
SLTP	165	28	193	2.05
SLTA	1.154	867	2.021	21.44
D.I	27	87	114	1.20
D.II	350	580	930	9.86
D.III	252	648	900	9.55
Sarmud	30	30	60	0.64
D.IV	39	43	82	0.87
S-1	1.424	3.118	4.542	48.18
S-2	269	249	518	5.49
Jumlah	3.769	5.659	9.428	100.00

2. Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
I	75	11	86	0.91
II	880	414	1.294	13.73
III	1.631	2.916	4.547	48.23
IV	1.183	2.318	3.501	37.13
Jumlah	3.769	5.659	9.428	100.00

3. Berdasarkan Eselon

Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
II.a	1	0	1	0.13
II.b	24	11	35	4.40
III.a	37	20	57	6.85
III.b	71	40	111	13.94
IV.a	304	186	490	61.56
IV.b	39	63	102	12.81
Jumlah	476	320	796	100.00

4. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Stuktural	475	320	795	6.88
Fungsional Guru	862	1.892	2.754	57.23
Fungsional Non Guru	526	1.651	1.382	12.27
Staf	1.531	783	2.314	23.63
Jumlah	4.711	6.555	11.266	100.00

E. Sumberdaya Keuangan

Sumberdaya keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2017 Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	Pendapatan Daerah	2.472.110.988.695,00	2.547.479.046.978,03
1.	Pendapatan Asli Daerah		718.151.492.310,00
2.	Dana Perimbangan		1.468.851.401.000,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah		360.476.153.668,03
B	Belanja Daerah	2.615.343.533.863,31	2.839.219.542.252,57
1.	Belanja Tidak Langsung		1.468.783.848.821,05
2.	Belanja Langsung		1.352.435.693.431,52
C	Surplus/Defisit		(291.740.495.274,54)

F. Isu Strategis

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2017, yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin masih tinggi

   Presentase penduduk miskin tahun 2015 sebesar 11,36%. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 11,85% dan diharapkan telah menurun kembali di tahun 2016. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang serius untuk menurunkan angka tersebut mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 41.023 KK. Upaya penanggulangan dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana; peningkatan pendapatan masyarakat miskin; pemugaran rumah tidak layak huni.

   Tingkat pengangguran terbuka tahun 2014 masih sebesar 6,17% atau sebanyak 25.943 orang dan 6,12% di tahun 2015. Hal tersebut disebabkan peluang kerja/kesempatan kerja yang ada tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja atau dengan kata lain ketidakseimbangan antara permintaah dan penawaran kerja. *Link match* antara pasar kerja denagn pencari kerja juga belum optimal. Disamping itu, penyebab yang lebih utama dikarenakan Sleman tidak bisa menciptakan kawasan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Selain itu perhitungan indeks gini menunjukkan bahwa pada tahun terakhir indeks gini sebesar 0,41 yang berarti masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk.

Beberapa permasalahan daerah lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah:

a. Rendahnya pendapatan penduduk yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan ketrampilan.
b. Rendahnya akses permodalan/keuangan/perbankan.
c. Belum adanya pendampingan yang intensif kepada kelompok miskin atas usaha yang sejenis.
d. Rendahnya akses pemasaran produk kelompok miskin.
e. Belum maksimalnya kemitraan antara kelompok miskin dan pelaku usaha yang lebih besar.

2. Kontribusi sektor ekonomi lokal masih rendah

Sektor ekonomi lokal di Kabupaten Sleman belum memberikan kontribusi yang maksimal. Beberapa potensi masih dapat terus dikembangkan dengan didiringi pembinaan, pendampingan, serta mempermudah akses modal. Beberapa potensi lokal Sleman yang masih akan dikembangkan adalah potensi desa wisata, produk-produk pertanian dan produk UMKM. Dari sektor pertanian, produktivitas padi di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan mencapai 65,33 kuintal/ha pada tahun 2015 dari 60,19 di 2014. Kenaikan ini turut mendukung persentase sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang meningkat menjadi 12,59% di tahun 2015 dari 8,87% di tahun 2014. Walaupun begitu, kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Sleman masih datang dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Hal ini dapat menjadi masalah karena sektor tersebut tidak banyak berperan di dalam penyediaan peluang kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian ini diharapkan akan meningkatkan Nilai Tukar Petani.

Pengembangan UMKM dan destinasi wisata menjadi salah satu target Kabupaten Sleman untuk menarik wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman yang pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 5.196.816 orang dengan rincian wisatawan nusantara sebanyak 4.936.929 orang dan 259.887 orang wisatawan mancanegara dibanding jumlah wisatawan pada tahun 2014 yang sebanyak 4.132.933 orang wisatawan, dengan rincian 3.820.575 orang wisatawan nusantara dan 312.358 orang wisatawan mancanegara.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 diharapkan mencapai 5,35%. Untuk pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 meliputi investasi PMA 57 unit dengan nilai investasi US$ 233,54, investasi PMDN 51 unit dengan nilai investasi Rp3.159.444,00 sedangkan Non fasilitas unit usahanya menjadi 34.548 dengan nilai investasi Rp4.756.616,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi nilai investasi PMA pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan, yaitu naik sebesar 0,68%. Sedangkan pada tahun 2014, realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu naik sebesar 62,37%. Naiknya total nilai investasi penanaman modal berdampak pada naiknya penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terserap oleh PMA pada tahun 2014 sebanyak 7.492 orang meningkat menjadi sebanyak 8.479 orang pada tahun 2015, PMDN pada tahun 2014 sebanyak 9.922 orang menjadi sebanyak 11.913 orang pada tahun 2015, dan non fasilitas pada tahun 2014 sebanyak 268.779 orang menjadi 282.872 orang pada tahun 2015.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan.

   Indeks kepuasan masyarakat yang dicapai oleh Pemerintah kabupaten Sleman masih berada di angka 78,54 pada tahun 2015 atau naik dari 77,77 di tahun 2014, sedangkan Indeks reformasi birokrasi baru berada di angka 60,97. Nilai tersebut masih perlu ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

   Beberapa isu lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang perlu mendapat perhatian adalah:

   a. Belum semua SKPD memiliki Standar Pelayanan (SP)
   b. Masih adanya pelanggaran displin oleh PNS
   c. Masih terdapat indikator capaian daerah yang belum tercapai (35 indikator tidak tercapai dari 132 indikator)
   d. Belum ada monitoring penerapan SOP
   e. Kurangnya komitmen terhadap pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru
   f. Keterbatasan prasarana dan sarana kearsipan
   g. Belum optimalnya pengelolaan informasi publik
   h. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
   i. Masih banyaknya perjanjian kerjasama yang pasif
   j. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal
   k. Cakupan pelayanan administrasi kependudukan belum menyeluruh
   l. Keterlibatan publik dalam musrenbang yang masih perlu ditingkatkan
   m. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres, pilkada, pilkades dan pilduk

4. Ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan

   Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 97,67%. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dapat lebih dioptimalkan lagi pada saat Pemerintah Kabupaten Sleman sudah mempunyai peraturan daerah tentang ketertiban umum yang saat ini masih menjadi pembahasan dengan legislatif.

   Pada bidang perlindungan masyarakat, khususnya pada aspek mitigasi bencana, Kabupaten Sleman masih menghadapi beberapa masalah seperti:

   a. Masih adanya kawasan rawan bencana longsor yang belum dipasang EWS
   b. Masih terdapatnya jalan evakuasi yang rusak
   c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih dibawah SPM yang diamanatkan Permendagri.

   Sebagai langkah antisipasi bencana di Kabupaten Sleman mulai tahun 2016 pengembangan lebih ditekankan pada pengembangan jumlah lembaga tangguh bencana dan sekolah siaga bencana demi meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mitigasi bencana serta penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

5. Masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan

   Kasus kematian bayi dan ibu melahirkan masih ditemukan di Kabupaten Sleman. Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 3,45 per 1.000 kelahiran, turun dari angka 4,65 per 1.000 kelahiran di 2014. Pada kasus kematian ibu melahirkan mencapai 27,67 per 100.000 ibu melahirkan, turun dari 83,29 per 100.000 ibu melahirkan. Walaupun telah terjadi penurunan pada kasus kematian bayi dan ibu melahirkan, sektor kesehatan tetap menjadi perhatian dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan lingkungan, peningkatan rumah tangga sehat, sarana prasarana kesehatan, perbaikan gizi masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana.

6. Kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan

   Belum optimalnya angka partisipasi sekolah untuk kelompok PAUD dan SMA/SMK/MI menjadi isu yang harus dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sleman masih di bawah 75% sedangkan APK di tingkat SMA/SMK/MI juga masih belum 100%. Banyaknya anak sleman yang bersekolah di luar Kabupaten Sleman, khususnya Kota Yogyakarta yang menyebabkan hasil penghitungan angka partisipasi sekolah belum maksimal, harus mendapat perhatian tersendiri dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan baik dari sarana prasarana, tenaga pendidik , prestasi siswa dan nilai kelulusan.

   Semakin maraknya kenakalan remaja, vandalisme, dan narkoba juga merupakan permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Untuk selanjutnya, demi mengoptimalkan kualitas pendidikan dan karakter generasi muda, Pemerintah Kabupaten Sleman akan selalu berusaha memenuhi kualifikasi guru layak mengajar, standar mutu manajemen berbasis sekolah (MBS) dan meningkatkan peran pemuda, baik di lingkungan sekolah dan masyarakat.

7. Penurunan kualitas lingkungan hidup

   Rendahnya kualitas lingkungan hidup yang dibuktikan dengan masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu dibawah 40% disebabkan oleh pencemaran yang terjadi pada udara, air dan tanah. Selain itu juga ditambah dengan produksi sampah yang tidak terkelola dengan maksimal di Kabupaten Sleman. Hingga tahun 2015 persentase penanganan sampah mencapai 39,97% dan rasio TPS per satuan penduduk sebesar 1,051.

   Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan Kabupaten Sleman masih berkisar di angka 30%, sedangkan luas lahan kritis di Kabupaten Sleman sebesar 122,4 ha dan alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan terbangun cukup besar dengan penurunan lahan pertanian sebesar 0,11% per tahun. Hal ini menjadi perhatian karena fungsi Kabupaten Sleman sebagai daerah konservasi resapan air untuk wilayah Kota Yogyakarta dan

Kabupaten Bantul. Demi meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman yang menjadi pendukung utama kehidupan masyarakat Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), meningkatkan rasio pelayanan dan pengelolaan sampah, serta mengelola alih fungsi lahan agar dapat terkendali dan sesuai pemanfaatannya.

8. Kualitas sarana dan prasarana publik masih perlu ditingkatkan

   Prasarana dan sarana publik di Kabupaten belum seluruhnya dalam keadaan baik.Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 0,5426 sedangkan drainase kondisi baik sebesar 48,76%. Hal ini berpengaruh pada kenyamanan berlalu lintas dan dapat memicu terjadinya kecelakaan.

   Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Sleman mencapai 1:8.244 dengan saluran sepanjang 2.698,34 km dan luas budidaya pertanian 22.233 ha. Sektor ini perlu mendapat perhatian besar karena pertanian merupakan salah satu penyumbang PDRB yang besar di Kabupaten Sleman. Selain itu, di bidang permukiman permasalahan ada pada rasio bangunan ber IMB baru mencapai 47,01 dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 98,33%, listrik 99%, dan sanitasi 88,27%.

   Sarana prasarana publik sangat diperlukan sebagai dasar pelayanan publik dan peningkatan daya saing di bidang ekonomi, khususnya potensi lokal yang ada di Kabupaten Sleman. Sebagai tindak lanjut, sarana dan prasarana publik akan ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan pembangungan, peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana publik.

9. Masih adanya konflik dan permasalahan sosial.

   Semakin heterogennya masyarakat Kabupaten Sleman mengakibatkan meningkatnya konflik sosial, suku dan agama serta jumlah PMKS. Permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal yang akan dilakukan adalah dengan menumbuhkan jiwa toleransi dan empati serta meningkatkan wawasan kebangasaan bagi anggota masyarakat.

   Selain konflik sosial, bidang kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak juga perlu mendapat perhatian. Walaupun IPG Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 72,30 pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi dengan aduan KDRT sebesar 237. Permasalahan lain yang perlu dioptimalkan penyelesaiannya adalah banyaknya fasilitas umum yang belum berperspektif gender.

10. Apresiasi masyarakat terhadap budaya yang belum optimal.

    Kabupaten Sleman memiliki 11 festival seni budaya yang diselenggarakan setiap tahun. Selain itu, juga terdapat 153 sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta 780 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Hal ini perlu ditingkatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat terutama dalam menjaga kelestariannya guna mendukung pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Sleman yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* pada Tahun 2021".

B. Misi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Sleman, yaitu:

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
c. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
d. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

C. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah:

a. Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah
b. Meningkatkan pembangunan manusia.
c. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat
d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat
e. Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak

Penjabaran misi dalam tujuan pembangunan daerah termasuk indikator dan target disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B	A
Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Meningkatkan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	IPM= $\sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ I1= kesehatan (harapan hidup) I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)	%	80,90	80,98	81,05	81,10	81,13	81,15

Tabel 2.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B	A
Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Meningkatkan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	IPM= $\sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ I1= kesehatan (harapan hidup) I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)	%	80,90	80,98	81,05	81,10	81,13	81,15

Tabel 2.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B	A
Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Meningkatkan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	IPM= $\sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ I1= kesehatan (harapan hidup) I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)	%	80,90	80,98	81,05	81,10	81,13	81,15

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017 disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2017, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Sleman Tahun 2017, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman dan Perubahannya Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat LAKIP Kabupaten	A
		2. Opini BPK terhadap LKD	WTP
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,74
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,48 tahun
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK PAUD	78,23 %
		2. APK SD/MI	≥ 100 %
		3. APK SMP/MTs	≥ 100 %
		4. APM SD/MI	≤ 100 %
		5. APM SMP/MTs	83,98 %
		6. Rata-rata lama sekolah	10,36 tahun
		7. Harapan rata-rata lama sekolah	15,74 tahun
		8. Rata-rata nilai ujian SD	236,18
		9. Rata-rata nilai ujian SMP	261,66
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi	5,46 %
		2. Indeks gini	≤ 0,40
7.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan pertanian	1. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,64 hari
		2. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2,01 hari
		3. Jumlah kunjungan wisatawan	4.117.000 orang
		4. Nilai ekspor	42.500.000 US$
		5. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	3,26 %
		6. Nilai tukar petani	111,90
		7. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	2,8 %
8.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,90 %
9.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian	1. Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	69,54 %
		2. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	65,45 % dan 72,54 %
10.	Menurunnya Kemiskinan	Persentase KK Miskin	10,02 %
11.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	
		1. Desa	29
		2. Sekolah	44
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Pencemaran Air	43
		2. Indeks Pencemaran Udara	41
		3. Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	32,26
13.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,98 %
14.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Jumlah Konflik SARA	≤ 5
15.	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	23,83 %

E. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	80,98
2.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,48
3.	Indeks Gini	Indeks	≤ 0,40
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,46
5.	Persentase KK Miskin	%	10,02
6.	Indeks Pembangunan Gender	%	96,20
7.	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,74
8.	Nilai Eksport	US$	42.500.000
9.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	2,8
10.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	Desa dan Sekolah	29 dan 44
11.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	31
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	37,00
13.	Indeks Pencemaran Air	Nilai	43,00
14.	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	41,00
15.	Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	Nilai	32,26
16.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	Wisatawan Nusantara: 1,64
			Wisatawan Mancanegara: 2,01
17.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.117.000
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rasio	5,90
19.	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	%	3,26
20.	Nilai Tukar Petani	%	111,90
21.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	78,23
22.	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	%	APK SD/MI: ≥100%,
			APK SMP/MTs: ≥100%
			APM SD/MI: ≤100%
			APM SMP/MTs: 83,98%
23.	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	10,36
24.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,74
25.	Rata rata Nilai Ujian SD dan SMP	SD/MI	236,18
		SMP/MTs	261,66
26.	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	%	23,83
27.	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	0,98
28.	Jumlah Kasus SARA	Jumlah kasus	≤ 5

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkanmerupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, capaian kinerja propinsi dan pemerintah pusat. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	80 s/d <95	Berhasil
3.	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d<50	Kurang Berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥95
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	98,79				Sangat berhasil
2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	101,80				Sangat berhasil
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	102,97				Sangat berhasil
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,11				Sangat berhasil
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	13	103,49				Sangat berhasil
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	2	99,30				Sangat berhasil
7.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan pertanian	7	156,53				Sangat berhasil
8.	Meningkatnya kesempatan kerja	1	102,03				Sangat berhasil
9.	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	2	122,20				Sangat berhasil
10.	Menurunnya kemiskinan	1	105,39				Sangat berhasil
11.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	2	110,89				Sangat berhasil
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	125,97				Sangat berhasil
13.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	571,43				Sangat berhasil
14.	Meningkatnya kerukunan masyarakat	1	100,00				Sangat berhasil
15.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	1	114,90				Sangat berhasil
	JUMLAH	39					

Pencapaian kinerja 15 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Berhasil	15	100,00
2.	Berhasil	-	-
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Kurang Berhasil	-	-
	Jumlah	15	

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah"

Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah", telah diukur dengan hasil disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2017

No	IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	(%)Capaian
1.	Predikat LAKIP Kabupaten	Predikat	A	BB	97,58
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100
	Rata-rata capaian				98,79

Sumber data: Sekretariat Daerah dan BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2017

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

a. Predikat LAKIP Kabupaten

Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman memperoleh nilai 78,06, predikat "BB" dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal. Hal ini sesuai surat Inspektorat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/48/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kabupaten Sleman Tahun 2016. Capaian kinerja Predikat LAKIP Kabupaten sebesar 97,58% dihitung dari perbandingan realisasi nilai LAKIP Pemerintahan Kabupaten Sleman sebesar 78,06 (predikat BB) dibagi nilai minimal predikat A yaitu 80,00 di kali seratus persen. Capaian kinerja tersebut dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 77,89 mengalami peningkatan sebesar 0,22%. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman pada tataran nasional, termasuk dalam kategori tinggi. Laporan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2017 terhadap LAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh predikat A sebanyak 2 daerah, predikat BB sebanyak 22 daerah, predikat CC sebanyak 153 daerah, dan predikat D sebanyak 8 daerah.

Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016.

Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Sleman atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, dengan predikat BB (Sangat Baik) dari MenPANRB

b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", sesuai surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 110/R/XVIII.YOG/05/2017 Perihal Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2017. Dengan demikian capaian indikator kinerja "Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah" tercapai 100%. Opini WTP telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak lima kali berturut-turut sejak tahun 2012.

Akuntabilitas tata kelola pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sleman pada aspek lain juga memperoleh prestasi antara lain:

1) Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi mengalami kemajuan, diukur dari indeks reformasi birokrasi yang mencapai 72,81 kategori BB. Capaian ini dibandingkan realisasi tahun 2016 pada indeks 69,86, naik 2,92 atau 4,22%.

2) Hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sejak tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman memperoleh predikat kategori "sangat tinggi".

3) Bupati Sleman memperoleh penghargaan *Leadership Award* Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri atas kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penghargaan *Leadership Award* yang diperoleh Kabupaten Sleman atas kepemimpinan birokrasi kepala daerah

4) Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan "Capaian Standar Tinggi". Kriteria ini adalah laporan keuangan memperoleh opini dari BPK "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", dan penetapan peraturan daerah Tentang APBD tepat waktu.

Wakil Bupati Sleman Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes menerima penghargaan bidang pengelolaan keuangan dan pelayanan publik Anugrah Dana Rakca, dari Kementerian Keuangan RI.

Piagam Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan "Capaian Standar Tinggi"

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	BB	BB	A
2.	Opini BPK terhadap Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
6) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
7) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
10) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp72.384.261.209,00 dari anggaran sebesar Rp124.359.109.927,00 atau 58.20 %. Realisasi keuangan sebesar 58.20% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,79%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1) Perencanaan kinerja dalam RPJMD dengan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil, terdapat keselarasan antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis, dan capaian kinerja serta prestasi Pemerintah kabupaten Sleman.

2) Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA), pengelolaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMAKDA), pengendalian kegiatan dan penyerapan anggran menggunakan Sistem Tim Pengendalian Penyerapan Anggaran (SIM TEPPA), pengelolaan aset menggunakan Sistem Informasi Aset Daerah (SIMASET), pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SIM LPPD), dan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (ESAKIP).

2. Analisis Kinerja Sasaran 2: "Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah" dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 101,80% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**. Data capaian kinerja sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2017

No	IndikatorKinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	31	31,56	101,80

Sumber data: BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2017

Realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2017adalah sebesar 31,56%, dihitung dari:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\% = \frac{\text{Rp825.627.814,82 *)}}{\text{Rp2.615.296.362.466,39 *)}} \times 100\% = 31{,}56\%$$

*) Datamerupakan angka*unaudited* oleh BPK.

Sumber PAD Kabupaten Sleman terdiri dari 8 jenis pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp528.440.988.318,18 (64,00%), 10 retribusi daerah sebesar Rp48.706.088.818,85 (5,90%), Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah/Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp36.292.784.407,97(4,40%), dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp212,187,867,727.82 (25,70%). Sumber pendapatan daerah meliputi PAD sebesar Rp 825.627.729.272,82 (31,57%), Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp1.780.956.416.460,57 (68,10%), dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp8.712.131.733,00 (0,33%). Realisasi persentase PAD terhadap pendapatan daerah, dibandingkan tahun lalu 30,8% meningkat 0,76%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	30,8	31,56	35

Sasaran tersebut dicapai melalui program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp15.356.607.751,00 dari anggaran sebesar Rp16.169.464.000,00, atau 94,97%. Realisasi keuangan sebesar 94,97% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,80%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

1) Kemampuan aparat mengenali potensi PAD baik obyek pajak maupun perilaku wajib pajak semakin baik sehingga kegiatan pendataan, pendaftaran wajib pajak, dan pemeriksaan perilaku wajib pajak semakin baik, sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak selain Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar 8%, dari 10.368 wajib pajak menjadi 11.301 wajib pajak.
2) Sosialisasi baik tatap muka, maupun lewat media elektornik, media cetak.
3) Perbaikan pelayanan kepada wajib pajak memanfaatkan teknologi informasi antara lain SIM-PAD, SIM-PBB P2, SIM-BPHTB, SISMIOP, dan e-SPTPD.
4) Kerjasama yang harmonis Pemerintah Kabupaten Sleman dengan para pemangku kepentingan, seperti KPP Pratama, Kantor Pertanahan, Notaris/PPAT, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pemerintah desa, bank dan lembaga keuangan untuk kemudahan pembayaran oleh wajib pajak antara lain Bank BPD, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI 46, dan seluruh KUD dalam jaringan PUSKUD Metaram.
5) Penegakan peraturan perpajakan berupa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara mandiri maupun melibatkan Kantor Akuntan Publik.

3. Analisis Kinerja Sasaran 3: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"

Hasil pengukuran capaian kinerjasasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 102,97% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2017

No	IndikatorKinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,74	81,08	102,97

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman Tahun 2017

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada lokus 136 unit organisasi, terdiri dari 48 perangkat daerah, dan 78 unit pelaksana teknis.

Capaian IKM tahun 2017 juga lebih baik dibandingkan IKM tahun 2016 yang terealisasi sebesar 79,36 atau meningkat 2,17%.

Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara lengkap yang disusun sesuai peringkat, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada PemerintahKabupatenSlemanTahun 2017

No	Unit Organisasi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan
1	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Minggir	A	Sangat baik	**93,00**
2	UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan	A	Sangat baik	**88,93**
3	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Seyegan	A	Sangat baik	**88,90**
4	Dinas Lingkungan Hidup	B	Baik	**87,86**
5	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngaglik	B	Baik	**87,77**
6	Kecamatan Tempel	B	Baik	**87,32**
7	Bagiam Umum Sekretariat Daerah	B	Baik	**86,58**
8	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	B	Baik	**86,55**
9	UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik	B	Baik	**86,33**
10	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	B	Baik	**86,24**
11	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan	B	Baik	**85,65**
12	Kecamatan Pakem	B	Baik	**85,41**
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	B	Baik	**85,00**
14	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II	B	Baik	**85,00**
15	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	B	Baik	**84,75**
16	Dinas Tenaga Kerja	B	Baik	**84,62**
17	Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel I	B	Baik	**84,48**
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	Baik	**84,25**
19	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I	B	Baik	**84,17**
20	Kecamatan Mlati	B	Baik	**84,03**
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	B	Baik	**84,00**
22	Kecamatan Cangkringan	B	Baik	**83,84**
23	UPT Pengelolaan Perparkiran	B	Baik	**83,81**
24	UPT Pelayanan Pasar Wilayah II	B	Baik	**83,75**
25	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III	B	Baik	**83,50**
26	UPT Pelayanan Persampahan	B	Baik	**83,50**
27	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean	B	Baik	**83,38**
28	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	B	Baik	**83,33**
29	Dinas Sosial	B	Baik	**83,15**
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	Baik	**83,04**
31	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	B	Baik	**83,02**
32	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	B	Baik	**82,77**
33	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok	B	Baik	**82,61**
34	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan	B	Baik	**82,25**
35	Kecamatan Ngemplak	B	Baik	**82,07**
36	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati	B	Baik	**81,98**
37	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak I	B	Baik	**81,96**
38	Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I	B	Baik	**81,95**
39	UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal	B	Baik	**81,84**
40	Kecamatan Kalasan	B	Baik	**81,79**
41	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II	B	Baik	**81,73**
42	Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan	B	Baik	**81,72**
43	Satuan Polisi Pamong Praja	B	Baik	**81,70**
44	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	B	Baik	**81,67**
45	UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat	B	Baik	**81,67**
46	UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah	B	Baik	**81,67**
47	UPT Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan	B	Baik	**81,66**
48	UPT Laboratorium Kesehatan	B	Baik	**81,57**
49	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan	B	Baik	**81,56**
50	Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I	B	Baik	**81,54**
51	Pusat Kesehatan Masyarakat Cangkringan	B	Baik	**81,41**
52	Dinas Pendidikan	B	Baik	**81,31**
53	UPT Pelayanan Pasar Wilayah IV	B	Baik	**81,28**

No	Unit Organisasi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan
54	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	B	Baik	**81,27**
55	Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem	B	Baik	**81,27**
56	Balai Latihan Kerja	B	Baik	**81,25**
57	Dinas Perpustaakan dan Kearsipan	B	Baik	**81,19**
58	UPT Museum Gunungapi Merapi	B	Baik	**81,13**
59	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Prambanan	B	Baik	**81,08**
60	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	B	Baik	**81,07**
61	Kecamatan Minggir	B	Baik	**81,04**
62	UPT Taman Pemakaman Umum	B	Baik	**81,04**
63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	Baik	**80,99**
64	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Pakem	B	Baik	**80,99**
65	Dinas Kesehatan	B	Baik	**80,98**
66	Dinas Kebudayaan	B	Baik	**80,90**
67	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI	B	Baik	**80,75**
68	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak	B	Baik	**80,74**
69	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah	B	Baik	**80,73**
70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	B	Baik	**80,70**
71	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VIII	B	Baik	**80,70**
72	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VII	B	Baik	**80,68**
73	Kecamatan Seyegan	B	Baik	**80,66**
74	Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan	B	Baik	**80,61**
75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	Baik	**80,59**
76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	Baik	**80,48**
77	UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	B	Baik	**80,48**
78	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Turi	B	Baik	**80,47**
79	Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel II	B	Baik	**80,47**
80	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II	B	Baik	**80,24**
81	UPT Pelayanan Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal	B	Baik	**80,20**
82	UPT Sub Terminal Agribisnis	B	Baik	**80,18**
83	UPT Pelayanan Pasar Wilayah I	B	Baik	**80,13**
84	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	B	Baik	**80,10**
85	Kecamatan Ngaglik	B	Baik	**80,07**
86	Kecamatan Depok	B	Baik	**80,04**
87	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	B	Baik	**80,00**
88	Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II	B	Baik	**79,87**
89	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	B	Baik	**79,86**
90	Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman	B	Baik	**79,83**
91	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah I	B	Baik	**79,83**
92	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah II	B	Baik	**79,83**
93	Dinas Perhubungan	B	Baik	**79,82**
94	Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II	B	Baik	**79,78**
95	Kecamatan Sleman	B	Baik	**79,76**
96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	Baik	**79,73**
97	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV	B	Baik	**79,68**
98	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	Baik	**79,60**
99	Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I	B	Baik	**79,57**
100	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III	B	Baik	**79,55**
101	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	B	Baik	**79,47**
102	Pusat Kesehatan Masyarakat Turi	B	Baik	**79,27**
103	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	Baik	**79,09**
104	Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V	B	Baik	**78,87**
105	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	Baik	**78,86**
106	Kecamatan Gamping	B	Baik	**78,83**
107	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan	B	Baik	**78,79**
108	Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II	B	Baik	**78,76**
109	Sanggar Kegiatan Belajar	B	Baik	**78,59**
110	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik I	B	Baik	**78,47**
111	Kecamatan Berbah	B	Baik	**78,27**
112	Kecamatan Turi	B	Baik	**78,17**
113	Kecamatan Moyudan	B	Baik	**78,09**
114	Kecamatan Godean	B	Baik	**78,08**
115	Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir	B	Baik	**78,08**
116	Sekretariat DPRD	B	Baik	**78,00**

No	Unit Organisasi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan
117	UPT Pelayanan Pasar Wilayah V	B	Baik	**78,00**
118	Dinas Pariwisata	B	Baik	**77,98**
119	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	B	Baik	**77,86**
120	Badan Keuangan dan Aset Daerah	B	Baik	**78,83**
121	Kecamatan Prambanan	B	Baik	**78,79**
122	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel	B	Baik	**78,76**
123	UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo	B	Baik	**78,59**
124	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Gamping	B	Baik	**78,47**
125	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman	B	Baik	**78,27**
126	UPT Pelayanan Metrologi Legal	B	Baik	**78,17**
127	UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur	B	Baik	**77,41**
128	UPT Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan	B	Baik	**77,17**
129	Dinas Pemuda dan Olahraga	B	Baik	**77,12**
130	UPT Pelayanan Pasar Wilayah III	B	Baik	**77,11**
131	Inspektorat	B	Baik	**77,03**
132	Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan	B	Baik	**76,75**
133	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	B	Baik	**76,72**
134	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	C	Kurang Baik	**76,08**
135	Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah	C	Kurang Baik	**75,87**
136	Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan	C	Kurang Baik	**75,61**
Nilai rata-rata				**81,08**

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman Tahun 2017

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,36	81,08	79

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
4) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dan Pencegahan tindakan Kriminal
5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
6) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
7) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
8) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
9) Program Penataan Administrasi Kependudukan
10) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
11) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
12) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
13) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
14) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

15) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
16) Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah
17) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
18) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
19) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
20) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
21) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
22) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
23) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan informasi pada masyarakat melalui resepsionis RSUD Sleman sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

24) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
25) Program Penegakan Hukum
26) Program Kerjasama Pembangunan
27) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
28) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
29) Program Pengembangan Data/Informasi
30) Program Pendidikan Kedinasan
31) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah
32) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
33) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek
34) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
35) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
36) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp244.166.917.148,00 dari anggaran sebesar Rp276.597.943.125,00 atau 88,27%. Realisasi

keuangan sebesar 88,27% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,97%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Loket Pelayanan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas,
2) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
3) Budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat semakin baik.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan pelayanan publik memperoleh beberapa prestasi, antara lain:

1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017" yang diikuti oleh 3.054 inovator dari Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk: (1) inovasi "Tua Keladi" pada Puskesmas Gamping I, dan (2) inovasi "Sunmor Sembada Minggu Pahingan" pada Kecamatan Sleman.

Penerimaan Penghargaan "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017"
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan, melakukan pembinaan, dan penilaian terhadap *role model* pelayanan publik pada 76 Kabupaten/Kota dengan fokus pelayanan kesehatan, perizinan, dan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Hasil yang diperoleh adalah RSUD Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan capaian kinerja dalam kategori baik (B).

3) Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan penghargaan INAGARA kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang berkomitmen melaksanakan inovasi administrasi Negara.

Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2017 yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman dari Kementerian Dalam Negeri RI

4) Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai peringkat ke 7 dari 10 nominator.

5)

Penghargaan INAGARA yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI

4. Analisis Kinerja Sasaran 4: "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat" disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,48	74,56**)	100,11

**) angka sangat sementara

Sumber data: DinkesKabupaten Sleman Tahun 2017

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sleman mencapai 100,11% dari target 74,48 tahun dapat terealisir 74,56 tahun (** angka sangat sementara dari BPS 2017). Capaian tersebut lebih tinggi atau diatas rata-rata DIY yang mencapai 74,00 tahun (data tahun 2016) dan UHH nasional 70,68 tahun.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,56	74,56	74,49

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
12) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14) Program Perencanaan Sosial Budaya.

15) Program Keluarga Berencana
16) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
17) Program Pelayanan Kontrasepsi
18) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
19) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
20) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
21) Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU
22) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
23) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
24) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp294.823.516.634,00 dari anggaran sebesar Rp321.178.965.610,00, atau 91,79%. Realisasi keuangan sebesar 91,79% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,11%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Usia Harapan Hidup masyarakat antara lain:

1) Kualitas kesehatan masyarakat semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain:

a) Angka kematian ibu melahirkan menurun sebesar 14,2%dari target sebesar 62,79% realisisai 42,4%, atau mencapai 132,82%. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 56,6%, maka terjadi penurunan 25,09%.

Bupati Sleman di salah satu lokasi Posyandu

b) Angka kematian bayi lebih baik karena lebih kecil dari target 4,33%, terealisasi 4,21% atau mencapai 102,85%.

c) Angka kematian anak balita per 1.000 kelahiran lebih baik dari target <1.8% hanya terjadi 0,14 %. Realisasi tahun lalu 0,35% sehingga mengalami penurunan.

d) Status Gizi buruk lebih baik karena menurun dari 0,46% menjadi 0,44%.

2) Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas yang telah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan dengan hasil sebagai berikut:

a) RSUD Sleman memperoleh akreditasi kategori "Paripurna" yang berlaku tanggal 10 Desember 2015-9 Desember 2018

b) RSUD Prambanan memperoleh akreditasi kategori "Paripurna" yang berlaku 10 Desember 2015-9 Desember 2018

c) Akreditasi Puskesmas mengahsilkan kinerja kategori Utama sebanyak 2 Puskesmas; Kategori Madya; dan Kategori Dasar: 15 Puskesmas yang berlaku tanggal 10 Desember 2015- 9 Desember 2018

3) Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), kesehatan reproduksi, Gerakan Masyarakat Cerdas Memilih Obat (Gema Cermat), gerakan rumah tangga tidak merokok, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta sosialisasi hidup sehat dengan olahraga.
4) Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
5) Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
6) Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.

Prestasi pembangunan bidang kesehatan antara lain:

1) Penghargaan Kabupaten Sehat Tingkat "Swasti Saba Wistara" Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri.

2) Puskesmas Minggir meraih Juara 2 Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional.

Bupati Sleman menerima Penghargaan Kabupaten Sehat Tingkat "Swasti Saba Wistara" Tahun 2017

5. Analisis Kinerja Sasaran 5:"Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan" dengan 9 (sembilan) indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Realisasi Indikator Sasaran 5Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	APK PAUD	%	78,23	78,27	100,05
2	APK SD	%	≥100	116,96	116,96
3	APK SMP	%	≥100	112,67	112,67
4	APM SD	%	≤100	104,61	104,61
5	APM SMP	%	83,98	85,16	101,41
6	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	10,36	10,64	102,70
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,74	16,08	102,16
8	Rata-rata Nilai Ujian SD	Nilai	236,18	219,91	93,11
9	Rata-rata Nilai Ujian SMP	Nilai	261,66	255,65	97,70
Rata-rata capaian					**103,49**

Sumber data: Disdik Kabupaten Sleman Tahun 2017

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah PAUD

Angka Partisipasi Sekolah PAUD, realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dari target 78,23% terealisasi 78,27%, atau mencapai 100,05%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 78,18% mengalami peningkatan sebesar 0,12%. Kemudian dibandingkan APK Provinsi DIY sebesar 51,73% juga lebih baik.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI dari target ≥100 terealisasi 116,96%, sedangkan APK SMP/MTs 112,67%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 116,90% mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Kemudian dibandingkan APK Provinsi DIY sebesar 107,63% juga lebih baik.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs.

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs dari target ≥100 terealisasi 112,67%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 111,71% mengalami peningkatan sebesar 0,86%. Kemudian dibandingkan APK Provinsi DIY sebesar 110,72% juga lebih baik.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui pemberian beasiswa

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI sebesar 104,61%, dari target ≥100%atau tercapai 104,61%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 103,96% mengalami peningkatan sebesar 0,63%. Kemudian dibandingkan APK Provinsi DIY sebesar 84,61% juga lebih baik.

e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI sebesar 104,61%, dari target ≥100% atau tercapai 104,61%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 85,11% mengalami peningkatan sebesar 0,06%. Kemudian dibandingkan APK Provinsi DIY sebesar 84,34% juga lebih baik.

f. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 terealisasi 10,64 tahun dari target 10,36 tahun, sehingga capaiannya sebesar 102,70%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 10,30 tahun mengalami peningkatan sebesar 3,30%. Rata-rata lama sekolah dari tahun 2012 cenderung meningkat, sehingga dapat menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sleman semakin baik.

g. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2017 dari target 15,74 tahun terealisasi 16,08 tahun, sehingga capaiannya sebesar 100,38%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 15,77 tahun mengalami peningkatan sebesar 1,97%.

h. Rata-rata Nilai Ujian SD

Capaian rata-rata nilai ujian SD sebesar 93,11%, dari target nilai 236,16 terealisasi 219,91. Meskipun tidak memenuhi target namun rata-rata nilai siswa Kabupaten Sleman menduduki peringkat 1 se Provinsi-DIY.

i. Rata-rata Nilai Ujian SMP

Capaian nilai ujian SMPsebesar 97,70%, dari target nilai261,66 terealisasi 255,65. Meskipun rata-rata nilai ujian SMP tidak mencapai target, namun masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata nilai ujian SMP Provinsi DIY sebesar 248,43 dan nasional sebesar 217,00. Rata-rata nilai ujian siswa SMP Kabupaten Sleman menduduki peringkat 2 se Provinsi DIY.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	78,18	78,27	78,35
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	116,90	116,96	≥100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	111,71	110,72	≥100
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	103,96	104,61	≤100
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	85,11	85,16	84,50
6	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	10,30	10,64	10,48
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,77	16,08	15,88
8	Rata-rata Nilai Ujian SD	Nilai	236,16	219,91	236,22
9	Rata-rata Nilai Ujian SMP	Nilai	261,17	255,65	261,71

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5) Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru
6) Program Pengembangan Budaya Baca
7) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
8) Program Pendidikan Anak Usia Dini
9) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
10) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp116.672.971.579 dari anggaran sebesar Rp174.621.028.606,00,atau 66,81%. Realisasi keuangan sebesar 66,81% dibandingkan dengancapaian kinerja sasaran sebesar 103,49%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1) Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Jumlah sekolah di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

   a) SD/MI berjumlah 534 sekolah, terdiri 379 sekolah negeri dan 155 sekolah swasta, dengan jumlah bangunan 3.828 unit, dalam kondisi baik 3.317 unit (86,65%) kondisi rusak ringan 450 Unit (11,76%), dan kondisi rusak berat 61 (1,59%).
   b) SD/MI berjumlah 534 sekolah, terdiri 379 sekolah negeri dan 155 sekolah swasta, dengan jumlah bangunan 3.828 unit, dalam kondisi baik 3.317 unit (86,65%) kondisi rusak ringan 450 Unit (11,76%), dan kondisi rusak berat 61 (1,59%).
   c) SMP/MTs berjumlah 137 sekolah, terdiri 65 sekolah negeri dan 72 sekolah swasta dengan jumlah bangunan 1.544 unit, dalam kondisi baik 1.440 unit (93,26%) kondisi rusak ringan 76 Unit (4,92 %), dan kondisi rusak berat 28 (1,81%).

2) Keberadaan guru sekolah dengan kualifikasi kelayakan mengajar meliputi:

   a) Guru TK/PAUD berjumlah 2.265 orang, meliputi 305 orang guru negeri dan 1.363 orang guru swasta, dengan kualifikasi kelayakan mengajar 71.52%.
   b) Guru SD/MI berjumlah 6.093 orang, meliputi 2.918 orang guru negeri dan 3.175 orang guru swasta, dengan kualifikasi kelayakan mengajar 87,71%.
   c) Guru SMP/MTs berjumlah 3.382 orang, meliputi 1.406 orang guru negeri dan 1.273 orang guru swasta, dengan kualifikasi kelayakan mengajar 90,18%.

3) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan BOSDA Propinsi dan BOSDA Kabupaten untuk jenjang pendidikan SD, SMP, yang digunakan pembelian buku, honorarium guru dan pegawai tidak tetap, evaluasi pembelajaran, alat tulis kantor, langganan jasa dan pemeliharaan ringan sarana prasarana.

4) Penyediaan anggaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah (JPPD) untuk siswa keluarga miskin pada jenjang SMA dan SMK terealisasi sebesar Rp 20.877.750.000 untuk 19.879 siswa.

5) Pendampingan kegiatan penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD.

6) Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam bidang pengembangan kualitas belajar mengajar dan peningkatan kualifikasi pendidik, seperti proses perolehan sertifikat pendidik oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (untuk DIY ditetapkan UNY), dan melibatkan akademisi dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

7) Pembinaan kreativitas siswa baik akademik (Olimpiade Sains, karya tulis ilmiah remaja), maupun non akademik (seni, olah raga).

8) Pemberdayaan kelompok kerja kepala sekolah (SD) dan musyawarah kerja kepala sekolah (SMP) dalam membangun kemitraan dan pendampingan siswa terutama menghadapi sukses ujian nasional, mengatasi kenakalan siswa, dan membangun karakter siswa.

9) Pembinaan karakter siswa kerjasama dengan AAU terhadap 100 siswa berpotensi berperilaku menyimpang diasramakan selama 6 hari.

10) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO pada 8 SMK Negeri, 9 SMK swasta.

Prestasi dan penghargaan di bidang pendidikan:

1) Prestasi yang diraih siswa sekolah pada tahun 2017 di tingkat nasional antara lain:
   a) Peringkat pertama lomba mendongeng atas nama Nahayani Imara Wijaya siswa SD Model Sleman.
   b) Peringkat kedua lomba IPA atas nama Hanif Al Azhar asal SD Al-Azhar 31 Yogyakarta.
   c) Peringkat ketiga lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) IPS atas nama Reny Dyah Kurniawati siswa SMP N 4 Pakem.
   d) Peringkat kedua Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) IPTEK DAN REKAYASA atas nama Nur Hakim Kadarisman, Aji Giriantoro dan Rahaqi Andhika siswa SMP N 2 Ngemplak.
   e) Juara I Instruktur tata rias pengantin oleh Puji Nopianti dari Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan

2) Prestasi tingkat internasional ditorehkan oleh Fathiria Sabika Nurhaliza, siswa SMP 4 Depok, dalam Kejuaraan Karate Terbuka *Tora Karate Championship 2017.*

3) Rata-rata nilai ujian SD memperoleh peringkat 1 se-Provinsi DIY.

4) Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas prestasi sebagai Juara I Instruktur Kursus Tata Rias Pengantin Dalam Rangka Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017.

Penghargaan sebagai Juara I Instruktur Kursus Tata Rias Pengantin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Prestasi Salah Satu Siswa Sleman Kejuaraan Karate Terbuka *Tora Karate Championship 2017*

6. Analisis Kinerja Sasaran 6 : "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi" dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 99,30% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**. Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,46	5,25*)	96,15
2.	Indeks Gini	Indeks	≤0,40	0,39*)	102,50
Rata-rata capaian					**99,30**

*) angka sementara

Sumber data: Diskominfo Kabupaten Sleman Tahun 2017

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 terealisasi 5,36% dari target 5,46%, sehingga capaiannya sebesar 98,17%. Pertumbuhan ekonomi ini meningkat 0,05% dibandingkan tahun lalu sebesar 5,31%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman (dalam Jutaan Rupiah) tahun 2016 Rp29,573,894.96 meningkat menjadi Rp31,159,875.73. Sektor tersier masih memberikan kontribusi terbesar (69,06%) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan serta penyangga bagi Kota Yogyakarta.

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio dari target sebesar ≤0,40, terealisasi 0,42, sehingga capaiannya adalah sebesar 95%. Realisasi Indeks Gini tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,45, dan apabila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi DIY sebesar 0,43% dan Indeks Gini nasional sebesar 0,393%.

Kegiatan usaha UMKM di wilayah Kabupaten Sleman

Indeks Gini merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria G<0,30 berarti ketimpangan rendah; 0,30≤G≤0,50 berarti ketimpangan sedang dan G>0,50 berarti ketimpangan tinggi. Realisasi indeks gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Sleman berada pada kriteria ketimpangan sedang.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,31	5,25*)	5,65
2.	Indeks Gini	Indeks	0,45	0,39*)	≤0,40

*) angka sementara

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
9) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Asongan
10) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
11) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp6.885.6357.728,00 dari anggaran sebesar Rp7.516.070.350,00 atau 91,22%. Realisasi keuangan sebesar 91,22% dibandingkan dengancapaian kinerja sasaran sebesar 99,30%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah:

1) Peningkatan jumlah usaha penanaman modal yaitu 4 Penanaman Modal Asing (PMA), 17 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan 2.324 Non PMA/PMDN, sehingga sampai tahun 2017 terdapat 70 PMA, 77 PMDN, dan 39.952 PMA/PMDN dengan nilai investasi PMA (US $) 235,340,000.00, PMDN Rp 3,893,330,000,000.0, dan Non PMA/PMDN Rp6,093,680,000,000.00.
2) Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian secara kuantitatif dan kualitatif serta didukung situasi keamanan yang kondusif
3) Pembinaan usaha, pembiayaan dana penguatan modal bagi UKM, dan pembinaan lainnya .

7. Analisis Kinerja Sasaran 7: "Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian" dengan 7 (tujuh) indikator kinerja mencapai 156,53% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**. Data capaian kinerja sasaran 7 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16 Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,64	1,83	111,59
2.	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,01	2,01	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.117.000	7.226.595	175,53
4.	Nilai Ekspor	US$	42.500.000,00	39.316.185,53	92,51%
5.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	2,8%	2,9%	103,57%
6.	Nilai Tukar Petani	Nilai	111,90	107,05*)	95,67
7.	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan	%	3,26	13,59*)	416,87
Rata-rata capaian					**156,53**

Sumber data: Disbud, Dispar, Disperindag, dan DP3 Kabupaten Sleman Tahun 2017

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara

Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dari target 1,64 hari terealisasi 1,83 hari atau mencapai 111,59%. Lama tinggal wisatawan nusantara meningkat 9,58% dibandingkan realisasi tahun sebesar 1,63 hari.

b. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara

Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dari target 2,01 hari terealisasi 2,01 hari atau mencapai 100%. Lama tinggal wisatawan mancanegara menurun 1,95% dibandingkan realisasi tahun sebesar 2,05 hari.

Rumus penghitunganlama tinggal wisatawan adalah jumlah hari lama tinggal semua wisatawan dibagi jumlah tamu yang menginap dikalikan100%. Data Lama Tinggal Wisatawan diperoleh dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berdasar jumlah rata-rata tamu menginap di hotel berbintang yang ada di Kabupaten Sleman.

Wisata "Lava Tour" di wilayah Kabupaten Sleman

c. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 dari target 4.117.000 orang terealisasi 7.226.595 orang, atau mencapai 175,53%.

Jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 35,81% dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 5.321.038 wisatawan. Bertambahnya jumlah wisatawan didukung oleh peningkatan jumlah sarana wisata di tahun 2017 seperti jumlah hotel 34,04%, restoran 11,54%, dan biro perjalanan wisata 7,17%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja kepariwisataan diantaranya adalah:

1) Kegiatan promosi wisata secara rutin melalui pameran, travel dialog, promosi lewat media dan lain-lain;
2) Penyenggaraaan beberapa event pariwisata dan budaya.
3) Peningkatan kapasitas pengelola pariwisata
4) Pengembangan “desa wisata” sebagai salah satu produk unggulan daerah.

Prestasi bidang kepariwisataan

Prestasi sektor kepariwisataan adalah penghargaan Juara 1 Tujuan Wisata Baru Terpopuler untuk Taman Breksi Kabupaten Sleman dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2017 dari Kementerian Pariwisata.

Penghargaan Juara 1 Tujuan Wisata Baru Terpopuler untuk Taman Breksi, dari Kementerian Pariwisata RI

d. Nilai Ekspor

Realisasi ekspor dari target US$ 42.500.000,00 terealisasi US$ 39.316.183,53 atau mencapai 92,51%. Realisasi ekspor meningkat 17,40% dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya mencapai US$33.488.303,40.

Faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor adalah terjadinya perpindahan lokasi usaha 7 perusahaan ekspor dari Kabupaten Sleman, dan 14 perusahaan yang menutup usahanya pada tahun 2016, serta 1 perusahaan ekspor yang tutup pada tahun 2017. Sehingga realisasi ekspor tahun 2017 tidak tercapai, walaupun pada tahun 2017 terjadi peningkatan volume ekspor sebesar 17% dari 2.825.674,84 kg tahun 2016 menjadi 3.301.140,08 kg pada tahun 2017.

Kerajinan sebagai salah satu produk ekspor Sleman

Prestasi sektor perdagangan antara lain:

1) 100 Finalis terbaik *The Big Start Indonesia-Session 2* ajang *creativepreneur* dari Bli Bli.Com kepada Giowari Putra Craft
2) Penghargaan Primaniyarta Kategori Exportir Pelopor Pasar Baru, dari Kementerian Perdagangan kepada PT. Mega Andalan Kalasan
3) Penghargaan "Pasar Tertib Ukur" dari Kementerian Perdagangan kepada Pasar Condongcatur dan Pasar Kebongagung

Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2017 untuk Pasar Condongcatur dan Pasar Kebonagung Kabupaten Sleman dari Kementerian Perdagangan

e. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri

Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri dari target 2,8% terealisasi 2,9% atau mencapai 103,57%. Angka ini diperoleh dari perbandingan nilai produksi tahun 2017 sebesar Rp 3.507.317.102,00 dengan tahun 2016 sebesar Rp 3.407.567.027,00

Pelatihan untuk peningkatan kemampuan produksi IKM

Faktor yang mempengaruhi kinerja sektor perindustrian antara lain:

- Peningkatan produksi industri karena bahan baku lokal mudah diperoleh, penggunaan teknologi yang tepat guna, dan stabilitas produksi perusahaan akibat penyesuaian upah pekerja/Upah Minimum Kabupaten.

Prestasi sektor perindustrian yaitu:

- Penghargaan Dekranas *Award* 2017 dari Dewan Kerajinan Nasional kepada Dekranasda Kabupaten Sleman.

Plakat penghargaan Dekranas *Award* 2017 dari Dewan Kerajinan Nasional

f. Nilai Tukar Petani (NTP)

Realisasi NTP berdasarkan angka sementara 107,05 dari target nilai 111,90 atau tercapai 95,67%. NTP ini menurun 0,79% dibandingkan angka tahun lalu sebesar 107,90. Namun lebih baik dibandingkan NTP Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (sampai dengan Desember 2017) yang mencapai 101,18.

Penghitungan NTP per sub sektor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Komponen Perhitungan NTP per Sub Sektor Tahun 2016-2017

Komoditas		2016	2017
Tanaman Pangan	It	141.12	145.77
	Ib	131.55	136.48
	IKRT	131.73	136.65
	BPPBM	140.47	135.50
	NTP	107.28	106.82
Hortikultura	It	133.85	150.13
	Ib	132.20	142.27
	IKRT	133.29	144.82
	BPPBM	127.83	131.92
	NTP	101.25	106.03
Perkebunan Rakyat	It	171.21	190.22
	Ib	132.42	138.89
	IKRT	136.41	141.69
	BPPBM	126.16	134.49
	NTP	129.23	136.94
Peternakan	It	152.43	159.33
	Ib	145.51	169.32
	IKRT	136.80	159.71
	BPPBM	154.26	178.97
	NTP	104.85	94.21
Perikanan Budidaya	It	126.74	122.08
	Ib	124.61	128.23
	IKRT	129.90	134.64
	IBPPBM	117.89	120.11
	NTP	101.72	95.20
Gabungan	It	145.07	153.80
	Ib	134.52	144.591
	IKRT	134.13	143.43
	BPPBM	134.13	143.43
	NTP	107.90	107.05

Sumber data: Diskominfo Kabupaten Sleman Tahun 2017

NTP salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani yaitu tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun

definisi NTP sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Perhitungan indeks yang diterima dilakukan dengan menggunakan harga produk yang dihasikan oleh petani pada tingkat produsen (petani). Harga pada tahun 2012 dijadikan sebagai pembanding baku dengan nilai 100. Indeks bayar adalah komponen yang digunakan untuk menghitung harga yang dibayar petani meliputi konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Konsumsi rumah tangga terdiri dari bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, transportasi dan komunikasi

BULOG membeli gabah petani Gapoktan Sumbersari Moyudan dengan harga tertinggi

g. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan.

Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dari target sebesar 3,26%, terealisasi 13,59% atau mencapai 416,87%. Penghitungan persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan disajikan dalam tabel.

Tabel 3.18 Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Capaian (%)
1.	**Pertanian & Perkebunan**			**30,45**
	a. Padi (ton)	322.417	289.070,00	-10,34
	b. Jagung (ton)	22.571,00	47.060,00	108,47
	c. Kedelai (ton)	88,00	22,00	-75,00
	d. Salak pondoh (kw)	730.053,00	451.237,00	-38,19
	e. Jambu Dalhari (kw)	24.261,99	7.566,68	-68,81
	f. Cabe (ton)	4.362,60	6.066,80	39,06
	g. Kelapa (kw)	73.693,50	67.267,44	-8,72
	h. Tembakau rakyat (kw)	956,70	806,95	-15,65
	i. Tebu (kw)	33.323,70	28.081,26	-15,73
	j. Kopi (kw)	481,77	2.396,17	397,37

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Capaian (%)
2.	**Peternakan**			**0,30**
	a. Satuan ternak	88.297,00	88.464,00	0,19
	b. Telur (kg)	16.938.020,00	16.642.760,00	-1,74
	c. Susu sapi (kg)	3.639.830,00	3.728.754,00	2,44
3.	**Perikanan**			**10,19**
	a. Ikan konsumsi (ton)	42.875,20	49.730,31	15,99
	b. Benih ikan (ekor)	1.082.030.340,00	1.157.760.000,00	7,00
	c. Ikan hias (ekor)	17.024.200,00	18.315.800,00	7,59
Rata-rata peningkatan				**13,65**

Sumber data: DP3K Kabupaten Sleman Tahun 2017

Pencapaian produksi pertanian dan perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komoditas pertanian

1) Produksi padi mengalami penurunan sebesar 10,34 %, dari 322.417 ton pada tahun 2016 menjadi 289.070,00 ton pada tahun 2017. Produktifitas padi sawah juga menurun 61,82 kw/ha menjadi 57,36 kw/ha pada tahun 2017 atau hanya mencapai 92,79% dari produktifitas tahun 2016.Luas tanam mengalami penurunan dari 54.636 Ha tahun 2016 menjadi 48.968 Ha di tahun 2017. Hal ini terjadi karena petani banyak menanam jagung menggeser areal tanaman padi akibat program bantuan benih jagung dari pemerintah pusat. Sedangkan produktivitas menurun karena serangan organisme pengganggu tanaman .

2) Produksi jagung meningkat dari 22.571 ton menjadi 47.060 ton pada tahun 2017 atau meningkat 108,47%. Luas tanam yang semula 3.309,3 Ha tahun 2016 menjadi 6.169,3 Ha tahun 2017 atau meningkat 186,42% dibandingkan luas tanam tahun 2016. Peningkatan luas tanam ini tidak terlepas dari adanya bantuan benih jagung dari pemerintah pusat pada tahun 2017.

3) Produksi kedelai juga menurun dari 86 ton menjadi 22,00 ton atau terjadi penurunan sebesar 75,00%. Hal ini disebabkan karena luas panen berkurang dari 58 ha menjadi 25 ha, dan penurunan produktivitas kedelai dari 15,2 kw/ha menjadi 9,57 kw/ha. Hal tersebut disebabkan banyaknya hujan di tahun 2017. Tanaman kedelai merupakan tanaman yang tidak tahan genangan.

4) Produksi salak pondoh tahun 2017 menurun dari 730.053 kwintal pada tahun 2016 menjadi 451.237 kwintal atau menurun 38,19%, yang dipengaruhi oleh

produktifitas yang mengalami penurunan dari 258,36 kw/ha menjadi 165kw/ha, dan jumlah rumpun salak pondoh yang berkurangdari 5.875.572 rumpun menjadi 5.830.175 rumpun. Komoditas salak pondoh merupakan komoditas unggulan yang cocok di tanam di wilayah lereng Gunung Merapi yaitu kecamatan Turi, Tempel dan Pakem. Namun harga salak pondoh yang relatif rendah menyebabkan banyak masyarakat petani salak pondoh yang melakukan pembongkaran terhadap rumpun salak pondohnya. Hal ini juga disebabkan biaya pemeliharaan salak pondoh yang tidak dapat terpenuhi jika dibandingkan dengan pendapatan dari hasil penjualannya.

Salak pondoh sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sleman

5) Produksi jambu dalhari mengalami penurunan sebesar 68,81%, dari 24.261,99 kwintal pada tahun 2016 menjadi 7.566,68 kwintal pada tahun 2017, yang dipengaruhi oleh penurunan produktivitas dari 108,58 kw/ha menjadi 82,78 kw/ha. Banyaknya hujan menyebabkan kerontokan buah dan penurunan kualitas jambu dalhari. Komoditas jambu dalhari merupakan komoditas unggulan dari wilayah Kecamatan Berbah dan Prambanan.

6) Produksi Cabe mencapai 6.066,80 ton atau naik sebesar 39,06% dari produksi tahun 2016 yang mencapai 4.362,60 ton. Luas panen tahun 2017 sebesar 28.499 ha naik dari tahun 2016 seluas 1.286 ha. Luas tanam dan luas panen yang meningkat 4,55% atas dukungan APBN untuk pengembangan cabe merah seluas 20 ha dan pengembangan cabe melalui dana Tugas Pembantuan. Produktivitas cabe yang semula berkisar 3-5 ton/ha pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,96 ton/ha di tahun 2017.

Panen Raya Cabe di Widodomartani, Ngemplak, Sleman

7) Produksi kelapa sebesar 67.267,44 kwintal atau menurun 8,72% dari produksi tahun 2016 yang berhasil mencapai 73.693,50 kw. Selain mengalami mengalami penurunan produktivitas, produksi kelapa dari tahun ke tahun mengalami penurunan disebabkan musim hujan yang ekstrim sehingga terjadi kerontokan pada calon bunga, dan populasi pohon kelapa berkurang dikarenakan banyak pohon kelapa yang ditebang untuk dijual kayu batangnya dan lahan digunakan untuk permukiman.

8) Produksi tembakau rakyat sebesar 806,95 kwintal, mengalami penurunan sebesar 15,65% dari tahun 2016 sebesar 956,70 kwintal. Luas panen menurun dari 956,70 ha tahun 2016 menjadi 213 ha pada tahun 2017 dan produktifitas juga menurun 6,31 kw/ha menjadi 3,78 kw/ha. Selain itu musim hujan yang terus menerus menyebabkan kerusakan pada tanaman tembakau, rendemen sangat turun, serta sebagian lahan tanaman tembakau tidak dapat dipanen karena ongkos tenaga tidak sesuai dengan hasil dari penjualan tembakau rakyat.

9) Produksi tebu tahun sebesar 33.323,70 kwintal atau mengalami penurunan dari 28.081,26 kwintal atau terjadi penurunan sebesar 15,73%. Luas panen tebu terus mengalami kenaikan dari 1.028,61 ha menjadi 1.901,66 ha di tahun 2017, namun kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan produksi karena produktivitas tebu mengalami penurunan dari 32,40 kw/ha di tahun 2016 menjadi 14,77 kw/ha di tahun 2017. Produksi tebu tidak mencapai target yang ditetapkan karena rendahnya randemen, sulitnya mendapatkan bibit bersertifikat dan biaya produksi yang tinggi sehingga banyak petani yang beralih ke komoditas lain.

10) Produksi kopi mengalami peningkatan dari 481 kw menjadi 2.396,17 kwintal di tahun 2017. Hal ini disebabkan luas panen tahun 2017 mengalami peningkatan dari 78,70 ha menjadi 719,05 ha. Peningkatan luas panen diperoleh dari hasil tanaman baru yang ditanam setelah kejadian erupsi Gunung Merapi tahun 2010.

Panen raya kopi tahun 2017

Produktivitas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 dari 4,05 kw/ha menjadi 3,88 kw/ha di tahun 2017,dikarenakan musim hujan yang menyebab bunga calon buah banyak yang gugur.

b. Komoditas peternakan

Produksi hasil peternakan meningkatsebesar 0,30 %. Jumlah satuan ternak yang semula 88.297 menjadi 88.464. Produksi telur menurun dari 16.938.020kg menjadi 16.642.760 kg atau terjadi penurunan produksi sebesar 1,74%. Produksi susu sapi dari 3.639.830 kg menjadi 3.728.754 kg atau terjadi peningkatan sebesar 2,44% di tahun 2017.

Pasar Hewan Ambarketawang Gamping, Kabupaten Sleman

c. Komoditas perikanan

Peningkatan produksi mencapai 10,19 % di tahun 2017 dari target yang ditetapkan sebesar 9%, kondisi ini dipengaruhi oleh:

1) produksi ikan konsumsi dari 42.875,20 ton menjadi 49.730,31 ton tahun 2017 atau meningkat 15,99%.
2) Peningkatan benih ikan dari 1.082.030.340 ekor naik sebesar 7% menjadi 1.157.760.000 ekor dan peningkatan ikan hias dari 17.024.200 ekor menjadi 18.315.800 ekor pada tahun 2017 atau naik sebesar 7,59%.

Kunjungan dari FAQ untuk Mina Padi di Kabupaten Sleman

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja bidang pertanian adalah:`

1) Pendampingan yang intensif dari petugas terhadap kelompok peternak terutama dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas produk. Pengawalan terhadap kesehatan hewan dan pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan juga sangat berpengaruh. Selain itu kesadaran beternak sesuai standar yang ditetap menjadi faktor penentu keberhasilannya.

2) Pendampingan yang intensif kepada seluruh pelaku bidang perikanan melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan, terpenuhinya sarana prasarana seperti bak penampungan ikan, unit pengolah ikan, kolam penampungan, serta sarana penunjang lainnya seperti benih dan pakan. Tehnologi Mina Padi dan Ugadi adalah andalan bagi pembudidaya ikan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan. Peningkatan pendapatan dari usaha mina padi bis mencapai 300% bila dibandingkan dengan hasil budidaya padi secara monokultur

Prestasi yang diperoleh di bidang pertanian:

1. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III (Seyegan) memperoleh penghargaan “Plakat Abdibaktitani” dari Kementerian Pertanian RI, bersama 14 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2017 lainnya se-Indonesia.
2. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V (Pakem) memperoleh penghargaan “Piagam Abdibaktitani” dari Kementerian Pertanian RI, bersama 16 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2017 lainnya se-Indonesia.

Kepala UPT BP4 Wilayah III Seyegan Kabupaten Sleman
menerima penghargaan Plakat Abdibaktitani dari Kementerian Pertanian

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,67	1,83	1,68
2.	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,05	2,01	2,05
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	5.321.038	7.226.595	5.149.000
4.	Nilai Ekspor	US$	33.488.303,36	39.316.183,53	45.000.000
5.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	2,79	2,9	3,2
6.	Nilai Tukar Petani	Nilai	107,90	107,05*)	112,70
7.	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan	%	-2,21	13,59	3,26

*) Angka sementara
Sumber data: Disbud, Dispar, Disperidag, dan DP3Kabupaten Sleman Tahun 2017

Sasaran "Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
5) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar
6) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

9) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
10) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
12) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
13) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
14) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
15) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
16) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
17) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
18) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
19) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
20) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
21) Program pengembangan Kemitraan
22) Program Pengembangan kemitraan
23) Program pengembangan Desa Wisata

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp32.520.555.284,00 dari anggaran sebesar Rp34.813.037.379,50 atau 93,41%. Realisasi keuangan sebesar 93,41% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 156,53%, maka terjadi inefisiensipenggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

8. Analisis Kinerja Sasaran 8: "Meningkatnya Kesempatan Kerja"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kesempatan Kerja" dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 102,03% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**. Data capaian kinerja sasaran 8 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Realisasi Indikator Sasaran 8Tahun 2017

No	IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,90	5,78	102,03

Sumber data: Disnaker Kabupaten Sleman Tahun 2017

Tingkat Pengangguran Terbuka diukur dengan membandingkan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 jumlah penganggur di Kabupaten Sleman sebanyak 34.951 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 604.701 orang, sehingga diperoleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,78%. Tingkat pengangguran terbuka

tahun 2017 lebih kecil dibandingkan kondisi dari tahun 2016 atau terjadi penurunan sebesar 0,04%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,82	5,78	5,40

Sasaran "Meningkatnya Kesempatan Kerja" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4) Program Transmigrasi Regional

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp4.474.776.047,00 dari anggaran sebesar Rp5.093.220.780,00, atau 87,86%. Realisasi keuangan sebesar 87,86% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,03%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

1) Program penanganan pengangguran dilaksanakan secara terkoordinasi, antara lain melalui kegiatan padat karya produktif (5 lokasi dengan memberdayakan 264 orang pekerja), pelatihan di Balai Latihan Kerja sebanyak 702 orang, penguatan modal bagi korban ter-PHK sebanyak 40 orang, dan pelaksanaan Program Transmigrasi 7 KK.

Pembuatan kolam ikandi Margomulyo Seyegan, salah satu kegiatan padat karya di Kabupaten Sleman

2) Penempatan tenaga kerja sejumlah 1.952 orang melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), LPTKS (Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta) dan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
3) Pelayanan informasi bursa kerja melalui Sistem berbasis *web* "Bursa Kerja *On Line"* (BKOL) sebanyak 1.785 pengguna atau orang dan layanan jemput bola dengan Sistem Pelayanan Informasi Pasar Kerja Keliling (Sarkeling) 40 lokasi sebanyak 1.600 orang.
4) Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan wirausaha baru sejumlah 120 orang.
5) Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik antara Pemerintah dengan perusahaan dan tenaga kerja dalam tripartit, sehingga tidak banyak terjadi demonstrasi pekerja serta PHK, dan tercipta iklim yang kondusif dalam usaha.
6) Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2017, dengan jumlah pendaftar sebanyak 1.068 orang, 7 kejuruan, kemudian terseleksi dan mengikuti sebanyak 702 orang.

"Pelatihan Tata Rias", salah satu bentuk pelatihan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja

Prestasi yang diperoleh:

1) Rudi Wardoyo (pekerja migran dari Kurahan, Margodadi, Seyegan Sleman) memperoleh Juara II Sektor Industri Konstruksi dan Manufaktur pada *Indonesian Migran Workers Award* (IMWA) 2017 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia di Kuching Malaysia pada tenggal 28 Oktober 2017.

2) Edi Nur Cahyaningtyas, ST. M.Eng. (Instruktur UPT Balai Latihan KerjaKabupaten Sleman) memperoleh Juara II Kompetisi Ketrampilan Instruktur Nasional VI Tahun 2017 Tingkat Regional XI Jawa Tengah Bidang Kompetensi Desain Grafis (*Graphic Design Technology*)

9. Analisis Kinerja Sasaran 9: "Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian" dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 117,83% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**. Data capaian kinerja sasaran 9 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	69,54	73,31	105,42
2.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai	%	65,45 dan 72,54	81,95 dan 98,64	125,21 dan 135,98
	Rata-rata capaian				**122,20**

Sumber data: Bappeda, DPUPKP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2017

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas

Salah satu saluran irigasi di wilayah Kabupaten Sleman

Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas dihitung dari jumlah pasar, jumlah obyek wisata, dan luas irigasi dalam kondisi baik milik Pemerintah Kabupaten Sleman. Bangunan pasar kabupaten kondisi baik berjumlah 22 pasar dari total pasar 42 buah.

Prasarana dan sarana obyek wisata kondisi baik adalah 3 dari 3 obyek wisata. Luas irigasi kondisi baik adalah 15.454 hektar dari 22.881 hektar total luas irigasi.

Dengan demikian angka realisasi prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas dihitung dari 22 bangunan pasar ditambah 3 prasarana dan sarana obyek wisata ditambah 15.454 hektar luas irigasi kondisi baik dibagi jumlah bangunan pasar,

prasarana dan sarana obyek wisata, dan luas irigasi 22.881 hektar kali seratus persen.

b. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Didukung Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai

Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap sebesar 81,94% dari target 65,45%, dengan capaian 125,21%. Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dihitung dari (1) jalan kondisi baik 372,55 km dan kondisi sedang 239,87 km dari total panjang jalan 699,5 km; dan (2) jembatan kondisi baik 114 buah, jembatan kondisi sedang 165 buah, dan kondisi baru 15 buah dari total jumlah jembatan 385 buah. Kondisi jalan mantap diperoleh hasil 87,54 % dari jumlah panjang jalan baik dan sedang dibagi panjang total jalan. Sedangkan jembatan mantap diperoleh 76,36% dari jumlah jembatan kondisi baik, sedang, dan baru dibagi jumlah total jembatan. Persentase jalan dan jembatan mantap adalah rata-rata jumlah jalan mantap ditambah jembatan mantap.

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai sebesar 98,64% diperoleh dari persentase prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan kondisi baik yang dibagi jumlah seluruhnya. Persentase tersebut dihitung dari 8.163 sarana prasarana kondisi baik yang terdiri dari 4 lokasi terminal, 160 unit rambu lalu lintas, 2 unit APILL, marka jalan 3.510 m2, 500 m2 pagar pengaman jalan, dan 3.689 buah LPJU jalan kabupaten, di bagi jumlah total sarana prasana yang ada.

Jalan dan jembatan baru (tahun 2017) di Dusun Panggung, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, semakin meningkatkan aksesibilitas warga Sleman

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.23 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	75,00	70,58	76,00
2.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	73,14	81,95	66,25

Sasaran meningkatnya prasarana dan sarana perkonomian tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4) Program Pembangunan Sistem Informasi/*Data Base* Jalan dan Jembatan
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
6) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
7) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
9) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
11) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
12) Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
13) Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
14) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
15) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
16) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp255.323.768.499,00 dari anggaran sebesar Rp281.160.882.728,00, atau 90,81%.Realisasi keuangan sebesar 90,81% dibandingkan dengancapaian kinerja sasaran sebesar 117,83%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

1) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi meliputi rehabilitasi bendung dan saluran 64 Daerah Irigasi (DI); peningkatan kuantitas jaringan irigasi di 36 lokasi; peningkatan fungsi jaringan irigasi 20 DI, saluran irigasi 10km, pintu air 27 buah; dan rehabilitasi ringan jaringan irigasi 22 DI.

2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap melalui kegiatan peningkatan jalan sepanjang 15,87 km pada 9 ruas jalan, rehabilitasi/pemeliharaan drainase pada 19 lokasidan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 15 lokasi, pemeliharaan aspal kabupaten 420 km, dan peningkatan jembatan sejumlah 7 buah. Kondisi jalan baik sepanjang 372 dan kondisi sedang sepanjang 239,87 km.
3) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti: fasilitas penerangan jalan umumsecara umum meningkat 18,10%, instalasi LPJU baru 152 titik, pemasangan KWh meter dan LPJU di 4 desa, pemasangan KWh meter Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di 20 lokasi, pemasangan Alat APILL tenaga surya di 2 lokasi, delinator 50 unit, cermin tikungan 60 unit, dan lampu peringatan di 3 lokasi, pemasangan rambu dan pengecatan marka jalan 3.510 meter persegi, serta pemasangan pagar pengaman jalan 500 meter. Fasilitas penerangan jalan umum secara umum meningkat. Jumlah LPJU meningkat 18,10% dari 12.208 buah menjadi 14.418 buah. Pemeliharaan rutin LPJU terjadi penurunan di tahun 2017, dari 5.210 titik menjadi 4.099 titik, penggantian komponen LPJU juga mengalami penurunan 13,15%, dari 1.209 titikmenjadi1.050 titik karena jumlah kerusakan peralatan tidak cukup banyak, dan pemasangan KWh meter 18 kelompok.

10. Analisis Kinerja Sasaran 10: "Menurunnya Kemiskinan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Menurunnya Kemiskinan" dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 105,39% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**. Data capaian kinerja sasaran 10 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase KK Miskin	%	10,02	9,48	105,39

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2017

Persentase KK Miskin di tahun 2017 sebesar 9,48% dihitung dari jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin 34.128 KK dibagi jumlah KK se-Kabupaten Sleman 359.844 KK. Data KK berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester I tahun 2017 sebanyak 359.844 KK. Persentase KK Miskin di tahun 2017 sebesar 9,48 menurun 1,16% dibandingkan kondisi tahun lalu sebesar 10,64%. Sebagai perbandingan, persentase KK Miskin DIY adalah 11,72%, dan angka nasional adalah 10,12%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.25 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Persentase KK Miskin	%	10,64	9,48	8,00

Keberdayaan masyarakat pedesaan yang terus menerus didorong untuk mendukung penurunan kemiskinan di Kabupaten Sleman

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Program Pembinaan Anak Terlantar
4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
7) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
8) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
9) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
10) Program Pengembangan Perumahan
11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
12) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
13) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp30.347.251.101,00 dari anggaran sebesar Rp32.860.171.539,00 atau 92,35%. Realisasi keuangan sebesar 92,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 105,39%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Kerajinan sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan peran perempuan pedesaan di wilayah Kabupaten Sleman

Berbagai bentuk layanan bagi KK dan Warga Miskin di Kabupaten Sleman, baik secara terjun lapangan (diantaranya melalui LASAMBA-Layanan Sambang Warga), maupun pelayanan menetap di Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1) Fasilitasi operasional Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 50.872 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2) Distribusi beras untuk keluarga miskin sebanyak 66.534 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
3) Bantuan pendidikan bagi siswa miskin untuk siswa.
4) Bantuan stimulan pembangunan/rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 256 unit dan penyampaian bantuan pembangunan rumah masyarakat kurang mampu atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sleman sebesar Rp1.000.000.000,00 sebanyak 153 rumah.
5) Pelayanan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk bantuan keuangan tak terencana bagi penduduk Kabupaten Sleman dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan atau rentan miskin serta ketelantaran di Kabupaten Sleman untuk pendidikan, kesehatan dan sosial sebanyak 1.437 orang
6) Pelayanan sosial terhadap pengaduan, keluhan, dan rujukan permasalahan sosial kepada 17.516 pengaduan

7) Pelatihan Ketrampilan bagi 3 kelompok calon warga binaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Desa Tirtoadi, Desa Widodomartani dan Desa Tamanmartani, dan pembinaan lanjut bagi 6 kelompok WRSE di Desa Sendangsari, Desa Sendangrejo, Desa Sumberrahayu, Desa Sindumartani, Desa Bimomartani, dan Desa Umbulmartani
8) Pelatihan kerja non institusional sub kejuruan tata boga, border, dan teknisi HP untuk penyandang difabel sebanyak 30 orang
9) Bantuan sosial berupa uang jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat sejumlah 110 orang
10) Bantuan sosial bagi KK miskin non potensial (kesrakat) dan lanjut usia rentan sosial ekonomi sebanyak 310 orang
11) Pembinaan dan penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Prestasi yang diraih, antara lain:

a. Peringkat I Evaluasi Pendamping KUBE berprestasi Tingkat Nasional atas nama Puji Lestari (Pendamping Kelompok Usaha Bersama - KUBE Sejahtera XV.SLKT.005 Nambongan Caturharjo Sleman Yogyakarta)

b. Peringkat I Evaluasi KUBE Berprestasi Tingkat Nasional atas nama Kelompok Usaha Bersama - KUBE Sejahtera XV.SL.KT.005 Nambongan Caturharjo Sleman Yogyakarta

Penerimaan Penghargaan KUBE dari Menteri Sosial

c. Penyelenggara *Family Development Session* Program Keluarga Harapan (FDS-PKH) Terbaik Tingkat Nasional atas nama Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

11. Analisis Kinerja Sasaran 11: "Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana" dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 110,89% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**. Data capaian kinerja sasaran 11 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.26 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana				
	- Desa	Jumlah	29	34	117,24
	- Sekolah	Jumlah	44	46	104,55
	Rata-rata Capaian				110,89

Sumber data: BPBDKabupaten Sleman Tahun 2017

Jumlah Lembaga Tangguh Bencana, meliputi Desa Tangguh Bencana (Destana) dari target 29, telah terealisasi sebanyak 34 desa, atau mencapai 117,24% dan Sekolah Siaga Bencana (SSB)realisasinya 46 sekolah yang melebihi target yang ditetapkan sebanyak 44 sekolah, sehingga realisasinya mencapai 104,55%. Rata-rata capaian kinerja 110,89%.

Penentuan indikator lembaga tangguh bencana meliputi Destana dan SSB ini didasarkan pada perubahan paradigma penanggulangan bencana dari penanganan bencana menuju pengelolaan bencana. Penanganan bencana umumnya hanya sampai pada tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembentukan Tim Teknis BPBD yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sleman (30 orang) dan Pusat pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Sleman (8 orang yang siap standby 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. TRC dan Pusdalops ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kejadian bencana yang selalu siap melakukan pemantauan potensi ancaman bencana dan penyampaian informasi awal adanya gejala ancaman bahaya yang dapat menjadi bencana di Ruang Pusdalops (*control room*). Pengelolaan bencana memfokuskan pada kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Pembentukan lembaga tangguh bencana melalui proses: sosialisasi, pelatihan dengan *output* peta resiko, peta ancaman bencana, dan skenario penanggulangan bencana, pembentukan tim destana dan tim kesiapsiagaan, gladi lapang, dan pengukuhan oleh Pejabat daerah.

Prakter Gladi Lapang di Sekolah Siaga Bencana sebagai salah bentuk kegiatan dalam pengelolaan bencana

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Jumlah Lembaga. Tangguh Bencana				
	- Desa	Jumlah	24	34	61
	- Sekolah	Jumlah	40	46	76

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Resiko Bencana tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp10.005.007.198,00 dari anggaran sebesar Rp11.712.613.430,00 atau 85,42%.Realisasi keuangan sebesar 85,42% dibandingkan dengancapaian kinerja sasaran sebesar 110,89%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Gladi Lapang pembentukan Destana di Sinduadi, Mlati, Sleman, Lansia, termasuk kelompok rentan yang harus didahulukan dalam evakuasi Tahun 2017

Evakuasi anak-anak dan ibu-ibu saat Gladi Lapang Pembentukan Destana di Sinduadi, Mlati, Sleman Tahun 2017

Simulasi penanganan korban dalam Gladi Lapang pembentukan SSB di SMA Muhammadiyah Prambanan Tahun 2017

Simulasi penanganan korban dalam Gladi Lapang pembentukan SSB di SMP Negeri 3 Berbah Tahun 2017

Di samping pembentukan Lembaga Tangguh Bencana, untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat maka dalam pelaksaan urusan bencana telah dilakukan kegiatan antara lain:

a. Pencegahan dini terhadap resiko bencana melalui sosialisasi, peringatan dini, dan simulasi penanganan bencana.

b. Penanganan kejadian bencana dilakukan melalui *operation room*, Tim Reaksi Cepat (TRC), peran-serta komunitas relawan bencana, dan penyampaian bantuan baik kepada masyarakat korban bencana, bantuan perbaikan rumah, maupun rehabilitasi sarana dan prasarana wilayah. Selama tahun 2017 telah disampaikan bantuan kepada 402 Kepala Keluarga yang rumahnya rusak akibat bencana, dan bantuan uang duka sebesar Rp10.000.000,00 kepada 2 orang korban bencana yang meninggal dunia. Jumlah bantuan yang disalurkan selama tahun 2017 sebesar Rp379.924.500,00.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

1) Dukungan dan kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
2) Adanya dukungan dana dari Desa melalui penganggaran di APBDes untuk menindaklanjuti Rencana Penanggulangan Bencana Desa, sehingga pelaksanaannya berjalan sinergis dan koordinatif.
3) Tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat di daerah rawan bencana dan warga sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid.

12. Analisis Kinerja Sasaran 12: "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 125,97% dan termasuk predikat "**sangat berhasil"**. Data capaian kinerja sasaran 12disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.28 Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan		Tahun 2017		
			Bobot	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pencemaran Air	Nilai	30%	43,00	29,00	67,44
2.	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	30%	41,00	81,11	217,68
3.	Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	Nilai	40%	32,26	33,95	105,27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				37	46,61	125,97

Sumber data:DLH Kabupaten Sleman Tahun 2017

Upaya yng dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman untuk menjaga kualitas air sungai agar tetap terminimalisir dari pencemaran

Cara pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Indeks Pencemaran Air (IPA)

Penghitungan nilai indek pencemaran air sungai menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$Lij = \sqrt{\frac{(Pjl.Ci)+\left(\frac{Ci}{Lij}\right)M}{2}}$$

dimana :

Lij= konsentrasi baku peruntukan air;

Ci= konsentrasi sample parameter kualitas air;

(Ci/Lij)M= adalah nilai maksimum dari Ci/Lij).

Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai dengan sampel di 60 titik pada Sungai Denggung, Boyong-Code, Pelang, Gajahwong, Konteng, Bedok, Opak, Tepus Kuning, Blotan Kruwet, dan Progo, air disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.29 Hasil Pemantauan Pencemaran Sungai Kabupaten Sleman

No	Waktu Pemantauan	Memenuhi baku mutu	Tercemar Ringan	Tercemar Sedang	Tercemar Berat
1.	Musim hujan (bulan Januari 2017)	11 titik (18%)	29 titik (48%)	13 titik (22%)	7 titik (12%)
2.	Musim kemarau (bulan September 2017)	6 titik (10%)	25 titik (42%)	20 titik (33%)	9 titik (15%)

Sumber data: DLH Kabupaten Sleman Tahun 2017

Dengan menggunakan formulasi penghitungan indeks pencemaran air sungai maka diperoleh nilai indek sebesar 29,67 untuk pemantauan yang dilakukan pada musim hujan, dan nilai sebesar 28,33 untuk pemantauan yang dilakukan pada musim kemarau. Apabila diambil nilai rata-rata hasil pemantauan pada musim hujan dan musim kemarau diperoleh nilai indeks pencemaran air sungai sebesar 29,00 (pencemaran air level baik).

Sungai di wilayah Kabupaten Sleman sebagian besar ditetapkan sebagai sungai kelas I (satu) berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi DIY.

Air sungai kelas I (satu) adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan kebutuhan lainnya yang mempersya-ratkan mutu air yang sama.

Salah satu sungai di KabupatenSleman

Namun demikian banyaknya sumber-sumber pencemar yang ada di sekitar sungai berupa permukiman, perdagangan, industri, kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan yang menghasilkan limbah cair yang langsung dibuang ke sungai, serta banyaknya pembuangan sampah ilegal di badan sungai memengaruhi kondisi kualitas air sungai.

b. Indeks Pencemaran Udara (IPA)

Penghitungan nilai indek pencemaran uadara menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\mathbf{IPU} = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$$

IPU = Indeks Pencemaran Udara
IPNO2 = Indeks Pencemar NO2
IP_{SO2} = Indeks Pencemar SO_2

Pemeriksaan kualitas Udara Passive Sampler
Komplek terminal Condongcatur

Pengukuran kualitas udara Ambien di Pertigaan
Candi Prambanan

Hasil uji sampel udara *ambient* dengan metode pasif sampler (NO2 dan SO2) tahun 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30 Hasil Uji Pasive Sampler

Lokasi	SO_2	NO_2
Transportasi	22,82	20,82
Industri/Agro Industri	13,19	10,85
Pemukiman	2,74	10,90
Perkantoran/Komersial	3,39	14,00
Rata-Rata	**10,53**	**14,14**

Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 3.31 Hasil Uji Sampel Udara *Ambient*

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	14,14	40,00	0,3535
SO2	10,53	20,00	0,5267
Rata-Rata			0,4401
Indeks Pencemaran Udara			81,11

Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Penghitungan indeks tutupan hutan/vegetasi merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Pada tahun 2017 penghitungan luasan hutan di Kabupaten Sleman sebesar 72,26 km^2, terdiri dari hutan rakyat seluas 47,56 km^2, hutan konservasi seluas 18,81 km^2 dan ruang terbuka hijau perkotaan seluas 5,89 km^2.

Tabel 3.32 Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Sleman 2017

No	Kabupaten	Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km2)	Luas Tutupan Hutan (km2)	Hutan/Luas Wilayah	Indeks Tutupan Hutan
1.	Sleman	1.046.622	574,82	72,26	12,57%	33,95

Sumber data: DLH Kabupaten Sleman Tahun 2017

Dari hasil penghitungan di atas maka diperoleh indeks tutupan hutan/vegetasi Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah 33,95 (indeks tutupan hutan level baik).

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.33 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Indeks Pencemaran Air	Nilai	42,00	29,00	47,00
2.	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	87,07	81,11	45,00
3.	Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	Nilai	33,95	33,95	32,30

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3) Program Lingkungan Sehat Perumahan
4) Program Perencanaan Tata Ruang
5) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
12) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp50.489.352.101,00 dari anggaran sebesar Rp55.375.831.053,00 atau 91,17%.Realisasi keuangan sebesar 91,17% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar

125,97%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi terhadap regulasi dan koordinasi antar instansi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan semakin intens.
2) Pembinaan kali bersih pada 17 sungai, pembinaan lingkungan di sekolah/pondok pesantren berbudaya lingkungan (adiwiyata), pembinaan kampung hijau, lomba *green and clean* (kebersihan dan keteduhan) antar kecamatan, dan sebagainya.
3) Pengendalian lingkungan melalui pelayanan izin lingkungan maupun penyelesaian pengaduan lingkungan.
4) Pelayanan pengelolaan sampah berupa 60 TPS besar, 197 TPS kecil, 29 TPS pasar, 16 TPS 3 R, 13 transfer depo, 22 container, 5 *truck armroll*, 30 *dump truck*, yang didukung tenaga sebanyak 199 orang.
5) Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan semakin baik.

Prestasi di bidang lingkungan hidup:

1) Penghargaan Adipura Kategori Kota Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diserahkan pada Rabu 2 Agustus 2017 di Jakarta.

2) Penghargaan Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Padukuhan Salam, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.
3) Penghargaan dalam Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan beberapa kategori sebagai berikut :
   a) Peringkat Hijau
      PT. Pertamina DPPU Adisucipto –Sleman (Peringkat Hijau)
   b) Peringkat Biru
      (1) PT. Kusuma Sandang Mekarjaya-Sleman
      (2) PT. Kanisius-Sleman
      (3) PT. Berlico-Sleman
      (4) PT. Mirota KSM-Sleman
      (5) PC. GKBI-Sleman

13. Analisis Kinerja Sasaran 13: "Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak" dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 571,43% dan termasuk predikat **"sangat berhasil".** Data capaian kinerja sasaran 13 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.34 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,98	5,6	571,43

Sumber data: DP3APPKBKabupaten Sleman Tahun 2017

Persentase penurunan kasus Perempuan dan Anak korban kekerasan dihitungdengan membandingkan data kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2016 sebanyak 499 kasus, dengan kejadian tahun 2017 sebanyak 471 kasus yaitu terjadi penurunan sebanyak 28 kasus. Selisih jumlah kasus tersebut dibagi jumlah kasus tahun lalu kali seratus persen yaitu (28/499)x100% = 5,6%. Selanjutnya realisasi persentase penurunan kasus tersebut 5,6% dibandingkan dengan target 0,98 % yaitu (5,6/0,98x100%)= 571.43%. Persentase penurunan kasus Perempuan dan Anak korban kekerasan dibandingkan tahun lalu yang masih mencapai 7,4%, maka kondisinya lebih baik karena telah terjadi penurunan 24,32%.

Saresehan Perempuan Bebas Kekerasan dalam rangka Hari Ibu

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.35 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Nilai	7,4	5,6	0,9

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
4) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp2.778.219.600,00 dari anggaran sebesar Rp2.870.390.800,00, atau 96,79%.Realisasi keuangan sebesar 96,79% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 571,43%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan, dan dikoordinasisikan dengan jejaring maupun forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2) Pelayanan terpadu perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bersama instansi terkait, dan masyarakat

Prestasi bidang perlindungan perempuan dan anak berupa penghargaan Kabupaten Layak Anak tahun 2017 kategori “Madya” dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya yang diperoleh Kabupaten Sleman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

14. Analisis Kinerja Sasaran 14: "Meningkatnya Kerukunan Masyarakat"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kerukunan Masyarakat" dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,00% dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**.Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.36 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Konflik SARA	Kasus	≤5	0	100,00

Sumber data: Badan KesbangpolKabupaten Sleman Tahun 2017

Jumlah konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) pada tahun 2017 tercatat 0 (nihil), artinya tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun ini. Kondisi ini sama seperti tahun 2016, tidak terdapat kasus SARA di wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pemantauan selama tahun 2017 situasi berlangsung aman dan kondusif. Kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik, dilakukan dialog secara persuasif dari berbagai oleh berbagai pihak baik aparat Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Kementerian Agama, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan tokoh masyarakat lainnya sehingga setiap permasalahan dapat diselesaian secara damai. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memelihara kerukunan masyarakat telah melakukan kegiatan melalui sarasehan bertempat wilayah kecamatan oleh FKUB, koordinasi setiap bulan dan kunjungan pemantauan lokasi potensi konflik oleh Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), pembinaan masyarakan lokasi potensi konflik oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pelaksanaan Forum Komunikasi Antar Partai Politik, sarasehan kerukunan, pembauran kebangsaan, anjangsana kepada tokoh-tokoh agama yang berpengaruhdan sebagainya.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.37 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Jumlah Konflik SARA	Nilai	0	0	≤3

Sasaran meningkatnya kerukunan masyarakat tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
4) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp7.584.552.480,00 dari anggaran sebesar Rp8.337.510.205,00 atau 90,97%.Realisasi keuangan sebesar 90,97% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1) Rasa toleransi, kepedulian dan kebhinekaan di masyarakat masih cukup tinggi;
2) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, forum kemitraan dan tokoh masyarakat terkait kerukunan dan toleransi cukup sinergis.

Pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sleman periode 2017 – 2022 oleh Bupati Sleman yang diwakili oleh Wakil Bupati Sleman Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes.

3) Tingkat kesadaran masyarakat akan penghargaan hak-hak politik individu mulai tumbuh dan meningkat, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa tidak timbul konflik yang berarti.
4) Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat yang kharismatik cukup mampu meredam gejolak di kalangan umat.

Silaturahmi FKUB dengan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Sleman.

5) Komunikasi yang baik diantara partai politik yang ada (FKAP) sehingga jika ada potensi konflik antar partai dapat terkomunikasikan dan tidak merembet ke konstituen.

15. Analisis Kinerja Sasaran 15: "Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya" dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai114,90% dengan predikat **"sangat berhasil"**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.38 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pelestarian warisan budaya	%	23,83	27,38	114,90

Sumber data: Disbud Kabupaten Sleman Tahun 2016

Persentase pelestarian warisan budaya pada tahun 2016 terealisasi 27,38% dari target 23,83%, sehingga capaiannya adalah sebesar 114,90%. Cara menghitung persentase pelestarian warisan budaya adalah jumlah benda cagar budaya dan situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 219 buah dibagi jumlah cagar budaya dan situs cagar budaya sebanyak 800 buah yaitu (219/800)X100%= 27,38%.Capaian indikator kinerja meningkat 14,70%dibandingkan realisasi tahun lalu 23,87%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.39 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2021
1.	Persentase pelestarian warisan budaya	Nilai	23,87	27,38	23,95

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Nilai Budaya
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4) Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp3.593.434.200,00 dari anggaran sebesar Rp3.659.481.200,00, atau 98,19%. Realisasi keuangan sebesar 98,19% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 114,90%, maka terjadi efisiensipenggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Salah satu strategi pembinaan dan pelestarian budaya melalui penampilan pertunjukan budaya masyarakat dalam Upacara Hari Jadi Sleman

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya:

1) Pembinaan yang intensif kepada pemilik, pelestari warisan budaya dan potensi warisan budaya, termasuk melalui pemberian penghargaan berupa penetapan warisan budaya dalam Surat Keputusan Gubernur/Bupati, bantuan dana, dan rehabiltasi bangunan warisan budaya.
2) Peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.
3) Peningkatan kualitas budaya masyarakat melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.
4) Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinan desa berbudaya di 6 desa; pelestarian nilai-nilai kebudayaan melalui lomba macapat, geguritan, mendongeng, cerita budaya daerah, dan lomba permainan tradisional; pembinaan lembaga kebudayaan terhadap 20 lembaga budaya; dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan melalui Karnaval Keprajuritan, Bregada Prajurit dan Bregada Narakarya.

Prestasi yang diperoleh bidang kebudayaan:

- Juara Umum Karnaval Keprajuritan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta tanggal 19 November 2017 dari 5 kategori memperoleh 3 juara yaitu Arak-Arakan terbaik, Atraksi terbaik, dan Penyaji Unggulan.

Karnaval Keprajuritan Kabupaten Sleman di Taman Mini Indonesia Indah

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran

b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.40 sebagai berikut:

Tabel 3.40 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitaas kinerja dan keuangan daerah	98,79	124.359.109.927	72.384.261.209	58,20	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	101,80	16.169.464.000	15.536.607.751	94,97	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	102,97	276.597.943.125	244.166.917.148	88,27	Efisien
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	100,11	321.178.965.610	294.823.516.634	91,79	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	103,49	174.621.028.606	116.672.971.579	66,81	Efisien
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	99,30	7.516.070.350	6.856.357.728	91,22	Tidak Efisien
7	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	156,53	34.813.037.380	32.520.555.284	93,41	Efisien
8	Meningkatnya kesempatan kerja	102,03	5.093.220.780	4.474.776.047	87,86	Efisien
9	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	122,20	281.160.882.728	255.323.768.499	90,81	Efisien
10	Menurunnya kemiskinan	105,39	32.860.171.539	30.347.251.101	92,35	Efisien

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
11	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	110,89	11.712.613.430	10.005.007.198	85,42	Efisien
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	125,97	55.373.831.035	50.489.352.101	91,17	Efisien
13	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	571,43	2.870.390.800	2.778.219.600	96,79	Efisien
14	Meningkatnya kerukunan masyarakat	100,00	8.337.510.205	7.584.552.480	90,97	Efisien
15	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	114,90	3.659.481.200	3.593.434.200	98,19	Efisien
	J U M L A H		**1.356.323.720.715**	**1.147.557.548.559**		

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Efisiensi penggunaan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terpusat melalui Bagian Layanan Pengadaan sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan sistem *e-procurement* Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), disajikan dalam tabel 3.41 berikut:

Tabel 3.41 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang dn Jasa

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Efisiensi
1	2016	359.282.876.055,00	309.739.124.640,00	49.543.751.415,00	13,79 %
2	2017	408.211.539.153,00	361.861.544.835,00	46.349.994.318,00	11,35 %

Sumber data: Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 yang terdiri dari 15 sasaran, adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 15 sasaran, atau 100%;
b. Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%;
c. Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
d. Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2017 sebanyak 39 prestasi nasional.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui surat nomor X.700/48/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sleman Tahun 2016, telah memberikan rekomendasi atas evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016, dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Rekomendasi Inspektorat DIY terkait **Perencanaan Kinerja**
   1) Melakukan dokumentasi atas tindak lanjut hasil monitoring capaian kinerja jangka menengah

      Rencana Aksi:

      - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 telah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, namun belum disajikan dalam Sistem

Informasi Manajemen (SIM). Pada masa yang akan datang hasil monitoring dan evaluasi dan tindak lanjutnya akan disajikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (SIMDALEV). Salah satu contoh hasil monitoring dan evaluasi adalah *refocussing* program dan kegiatan, yaitu:

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	
		*)	**)
2016	185	1.049	2.429
2017	178	929	2.130
2018	177	847	1.717

Catatan: untuk kegiatan yang sama namun muncul di lebih dari satu SKPD;
*) dihitung hanya 1 kali
**) dihitung sesuai jumlah pelaksanaannya

2) Memanfaatkan secara optimal Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengoordinasian kegiatan antara lain pemanfaatan dalam otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan

Rencana Aksi:

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dalam SIMDALEV, selain menyajikan data evaluasi per triwulan sebagaimana saat ini, pada masa yang akan datang disajikan juga narasi pada target yang tidak tercapai, dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

b. Rekomendasi Inspektorat DIY terkait **Pengukuran Kinerja**

1) Hasil pengukuran kinerja agar dikaitkan dengan pemberian *reward & punisment*

Rencana Aksi:

- Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sleman akan menyempurnakan Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja.

c. Rekomendasi Inspektorat DIY terkait **Pelaporan Kinerja**

1) Penyajian Informasi Kinerja dalam LKjIP agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Rencana Aksi:

- Penyajian informasi kinerja telah memuat analisis efisiensi penggunaan sumberdaya sebagaimana tercantum dalam Bab III huruf C LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017, yang memuat:
  - ✓ Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase serapan anggaran.
  - ✓ Perbandingan anggaran pengadaan barang dan jasa dengan penetapan nilai pengadaan kepada penyedia barang dan jasa oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

d. Rekomendasi Inspektorat DIY terkait **Evaluasi Internal**

1) Pemantauan dan evaluasi atas Rencana Aksi agar menampilkan keterangan maupun hal-hal penting khususnya pada kegiatan yang belum mencapai target disertai dengan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

Rencana Aksi:

- Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per triwulan telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan SIMDALEV. Hasil evaluasi memuat faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut. Pada masa yang akan datang SIMDALEV akan dibenahi sehingga mampu menampilkan juga narasi target yang tidak tercapai, dan rencana aksi perbaikannya.

2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti/diimplementasikan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan manajemen kinerja, pemberian reward & punisment dan perbaikan pelaksanaan program

Rencana Aksi:

- ✓ Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja akan menjadi rujukan dalam perbaikan perencanaan, manajemen kinerja, pemberian *reward and punishment*, dan perbaikan pelaksanaan program.

e. Rekomendasi Inspektorat DIY terkait **Pencapaian Kinerja**

1) Hasil pengukuran kinerja agar dikaitkan/ditindaklanjuti dengan insentif/*merit system*

Rencana Aksi:

- Pemerintah Kabupaten Sleman akan mengaitkan dan menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja dengan insentif/*merit system* berupa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja pada tahun 2018, yang didukung aplikasi e-Kinerja.

2) Dilakukan peningkatan kinerja agar dapat diperoleh penghargaan tidak hanya bertaraf nasional tetapi juga penghargaan bertaraf internasional

Rencana Aksi:

- Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus memacu diri dan mendorong kemajuan di semua sisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

LAMPIRAN

DAFTAR PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017

No	Prestasi
1	Predikat LAKIP "BB" (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Indeks Reformasi Birokrasi 72,81 Kategori "BB" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan
4	Penghargaan Anugrah Dana Rakca, dari Kementerian Keuangan RI, atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi
5	Penghargaan *Leadership Award* Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri
6	Predikat kategori "sangat tinggi" atas laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri
7	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 untuk Inovasi "Tua keladi" (Santun Lansia Kesehatan Layak Diperhatikan) Puskesmas Gamping I, penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
8	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 untuk Inovasi "Sunmor Sembada Minggu Pahingan" Kecamatan Sleman bersama KIM, penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
9	Role Model Pelayanan Publik Kategori "Baik", penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
10	Role Model Pelayanan Publik Kategori "Baik", penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
11	Role Model Pelayanan Publik Kategori "Baik", penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupetan Sleman
12	Penghargaan INAGARA kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)
13	Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai peringkat ke 7 dari 10 nominator.
14	Penghargaan Swasti Saba Wistara dari Kementerian Kesehatan sebagai kabupaten/Kota Sehat untuk Klasifikasi Pengembangan
15	Juara 2 Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional oleh Puskesmas Minggir
16	Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) 2017 dari dari Kemenpan RB dan KPK diperoleh Puskesmas Gamping I
17	Juara II dalam Kejuaraan Karate Internasional Terbuka Tora Karate Championship 2017 oleh Fathiria Sabika Nurhaliza, siswa SMP 4 Depok
18	Juara I Instruktur tata rias pengantin oleh Puji Nopianti dari Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prestasi
19	Peringkat ketiga lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) IPS atas nama Reny Dyah Kurniawati siswa SMP N 4 Pakem
20	Peringkat kedua Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) IPTEK DAN REKAYASA atas nama Nur Hakim Kadarisman, Aji Giriantoro dan Rahaqi Andhika siswa SMP N 2 Ngemplak.
21	Peringkat kedua lomba IPA atas nama Hanif Al Azhar asal SD Al-Azhar 31 Yogyakarta
22	Peringkat pertama lomba mendongeng atas nama Nahayani Imara Wijaya siswa SD Model Sleman
23	Juara I Tujuan Wisata Baru Terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2017 dari Kementerian Pariwisata
24	Penghargaan Dekranas Award 2017 dari Dewan Kerajinan Nasional kepada Dekranasda Kabupaten Sleman
25	Penghargaan “Pasar Tertib Ukur” dari Kementerian Perdagangan kepada Pasar Condongcatur dan Pasar Kebongagung
26	Penghargaan Primaniyarta Kategori Exportir Pelopor Pasar Baru, dari Kementerian Perdagangan kepada PT. Mega Andalan Kalasan
27	Penghargaan untuk Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi Bidang Pertanian dari Kementerian Pertanian, berupa "Plakat Abdibaktitani" bagi Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III (Seyegan)
28	Penghargaan untuk Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi Bidang Pertanian dari Kementerian Pertanian, berupa "Piagam Abdibaktitani" bagi Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V (Pakem)
29	Juara II sektor industri konstruksi dan manufaktur pada Indonesian Migran Workers Award (IMWA) 2017 a.n Rudi Wardoyo oleh Pemerintah Malaysia
30	Juara II Kompetisi Ketrampilan Instruktur Nasional VI Tahun 2017 Tingkat Regional XI Jawa Tengah Bidang Kompetensi Desain Grafis (*Graphic Design Technology*)
31	Peringkat I Evaluasi KUBE Berprestasi Tingkat Nasional atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Nambongan Caturharjo Sleman Yogyakarta
32	Penyelenggara *Family Development Session* Program Keluarga Harapan (FDS-PKH) Terbaik Tingkat Nasional atas nama Dinas Sosial Kabupaten Sleman
33	Peringkat I Tingkat Nasional atas nama Puji Lestari (Pendamping KUBE Sejahtera Nambongan Caturharjo Sleman Yogyakarta)
34	Penghargaan Tingkat Nasional Adipura Kategori Kota Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
35	Penghargaan Kampung Iklim kepada Padukuhan Salam, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36	Penghargaan Kabupaten/Lota Layak Anak 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37	Juara Karnaval Keprajuritan di Taman Mini Indonesia Indah kategori Penyaji Atraksi Terbaik
38	Juara Karnaval Keprajuritan di Taman Mini Indonesia Indah kategori Penyaji Arak-Arakan Terbaik
39	Juara Karnaval Keprajuritan Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah kategori Penyaji Ungggulan

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

SLEMAN SEMBADA

sleman
the living culture
heart of java